



PERATURAN DAERAH

Tentang

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN MESUJI TAHUN 2005-2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
2012**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
NOMOR 07 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN MESUJI TAHUN 2005-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

Menimbang:

- a. Bahwa untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif, efisiensi dan bersasaran, perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2005—2025;
- c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mesuji Tahun 2005-2025 dalam Peraturan Daerah;

Mengingat:

- 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

- 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah menjadi beberapa kali terakhir dan Undang-Undang Perubahan dari Undang-Undang 32 tahun 2004 yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
- 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);
- 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663)
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
- 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 20 Peraturan Daerah Nomor: 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MESUJI
dan
BUPATI MESUJI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN
2005 – 2025.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mesuji;
3. Bupati adalah Bupati Mesuji;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2005 – 2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Mesuji, adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
7. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Kabupaten Mesuji periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Kabupaten Mesuji Tahun 2005-2025;
- (2) Rincian dari program pembangunan Kabupaten Mesuji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 tahun ke depan yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Lampung.

Pasal 4

- (1) Dokumen RPJP Daerah Mesuji sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) RPJP Daerah Mesuji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Mesuji yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman untuk menyusun APBD.

Pasal 5

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Kabupaten Mesuji, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya;

Pasal 6

Sistematikan RPJP Daerah Mesuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 terdiri dari:

- a. BAB I Pendahuluan
- b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
- c. BAB III Analisis Isu-isu Strategis
- d. BAB IV Visi dan Misi
- e. BAB V Arah Kebijakan Pembangunan
- f. BAB VI Kaidah Pelaksanaan

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Mesuji melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah Mesuji;
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

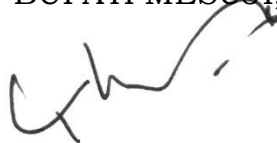
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 29 Agustus 2012

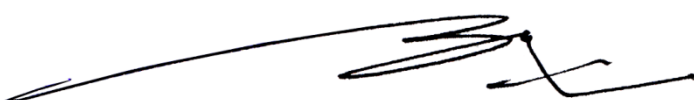
BUPATI MESUJI,



KHAMAMI, SH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 29 Agustus 2012

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN MESUJI



Drs. AGUS SALIM, MAP.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2012 NOMOR 18

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BALAKANG	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.3. LANDASAN HUKUM	4
1.4. HUBUNGAN RPJP DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA	6
1.5. SISTEMATIKA	8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	10
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	10
2.1.1. Geografis	10
2.1.2. Demografis	13
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	14
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	14
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	15
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	15
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM	16
2.3.1. Pendidikan	16
2.3.2. Kesehatan	17
2.3.3. Kemiskinan	24
2.3.4. Ketenagakerjaan	24
2.3.5. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	25
2.3.6. Akseptor Keluarga Berencana	25
2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH	25
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	25
2.4.2. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)	26
2.4.3. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	27
2.4.4. Penataan Wilayah	30
2.4.5. Sarana Dan Prasarana Umum	33
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	37
3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	37
3.1.1. Pembangunan Ekonomi	37
3.1.2. Pembangunan Sosial	37

3.1.3. Pembangunan Prasarana Wilayah	38
3.1.4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	39
3.1.5. Permasalahan Khusus.....	39
3.2. ISU STRATEGIS DAERAH	40
3.2.1. Isu Bidang Ekonomi	40
3.2.2. Isu Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan	42
3.2.3. Isu Bidang Infra Struktur	45
3.2.4. Isu Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan	47
BAB IV VISI DAN MISI	49
4.1. VISI	49
4.1.1. Tumbuh	49
4.1.2. Berkembang	49
4.1.3. Maju	50
4.1.4. Berdaya Saing	50
4.1.5. Bumi Agribisnis	50
4.2. MISI	51
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	52
5.1 SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN	52
5.1.1 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Misi: <i>Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat.....</i>	52
5.1.2 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Misi: <i>Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dan Utilitas</i>	56
5.1.3 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Misi: <i>Mewujudkan Tata Kelola dan Aparatur Pemerintah yang Baik, Bersih, Prima dan Berwawasan Kewirausahaan.....</i>	57
5.1.4 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Misi: <i>Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia</i>	60
5.1.5 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Misi: <i>Masyarakat Rligius, Berbudaya dan Tata Hukum</i>	62
5.1.6 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Misi: <i>Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	63
5.1.7 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Misi: <i>Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Mineral Secara Berkelanjutan</i>	64
5.2 TAHAPAN DAN PRIORITAS	65
5.2.1 Tahap Lima Tahun Ke-1 (2011-2015)	66
5.2.2 Tahap Lima Tahun Ke-2 (2016-2020)	70
5.2.3 Tahap Lima Tahun Ke-3 (2021-2025)	74

BAB VI Kaidah Pelaksanaan 79

6.1 Umum 79

6.2 Mekanisme Pelaksanaan RPJPD 79

6.3 Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 80

6.4 Implementasi Kepemimpinan Strategik 81

6.5 Implementasi Budaya Kerja 82

6.6 Implementasi Sistem Teknologi Informasi Dan Komunikasi 82

6.7 Implementasi Manajemen Keuangan Berbasis Kinerja 83

6.8 Implementasi Sumber Daya Aparatur 83

6.9 Implementasi Struktur Organisasi Pendukung Strategi .. 84

6.10 Pengembangandan Implementasi Prosedur Operasional Standar..... 84

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Lainnya 7



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur tak terhingga kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mesuji Tahun 2005-2025, telah disetujui siap untuk diundangkan.

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2005-2025, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), bahwa kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN. Selanjutnya RPJP Daerah ini akan menjadi acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dalam periode 5 (lima) tahunan.

Proses penyusunan RPJP Daerah ini dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama dengan didahului studi, penelitian dan musyawarah *stakeholders* sesuai dengan pedoman penyusunan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Akhirnya terhadap semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Mesuji ini, saya ucapkan terimakasih.

Mesuji, 29 Agustus 2012

BUPATI MESUJI,

KHAMAMI

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji
Nomor : 07
Tahun : 2012
Tentang : Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP)
Daerah Kabupaten Mesuji
2005—2025

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka Daerah berkewajiban menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 (dua Puluh) tahunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dokumen RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan induk yang bersifat makro, sehingga isinya memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Kabupaten Mesuji yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di atas.

Maka disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Mesuji Tahun 2005-2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJP Nasional Tahun 2005–2025 dan RPJP Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005–2025 yang memuat visi, misi, serta arah pembangunan jangka panjang daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. Berdasarkan Undang-undang tersebut perodesasi RPJP Daerah Mesuji adalah 2005-2025, walaupun masa efektifnya adalah 2011-2025.

RPJP Daerah Kabupaten Mesuji digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Mesuji pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD Kabupaten Mesuji sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Mesuji.

Untuk itu dalam pelaksanaan otonomi daerah dibutuhkan pedoman berupa perencanaan pembangunan daerah yang sistematis dan bertahap. Prakarsa pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dilandasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pemerintah daerah diamanatkan menyusun perencanaan jangka panjang (dua puluh tahun), jangka menengah (lima tahunan), dan pembangunan tahunan yang sinergis antar daerah serta antara pembangunan daerah dan pembangunan secara nasional. Perencanaan pembangunan disusun untuk mencapai tujuan dan cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005–2025 dengan Visi Pembangunan yaitu “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui delapan misi pembangunan nasional, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Dalam RPJP Nasional, Pemerintah memperhatikan komitmen yang dibangun bersama dengan 189 negara anggota Perserikatan

Bangsa-Bangsa lainnya untuk mewujudkan *Millenium Development Goals* (MDGs), yang terdiri atas:

1. Menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan;
2. Memberlakukan pendidikan dasar yang universal;
3. Mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Memperbaiki kesehatan maternal;
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya;
7. Menjamin kesinambungan lingkungan hidup;
8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak berjalan dengan baik, harus ditata ulang atau diperbarui. Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, Reformasi Birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu, dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, harus segera diambil langkah langkah yang bersifat mendasar, komprehensif dan sistemik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Mencermati perkembangan yang dinamis dan sangat cepat tersebut di atas serta sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan RPJP Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka diperlukan penyusunan rancangan RPJP Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2005–2025 yang sesuai dengan peraturan tersebut. Berbagai target pencapaian hasil, strategi, kebijakan dan program perlu dirumuskan kembali untuk menjamin terlaksananya dan tercapainya keberhasilan pembangunan pada masa mendatang dengan pencapaian tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Kerangka pemikiran dalam penyusunan RPJP DAERAH Kabupaten Mesuji Tahun 2005 – 2025 didasarkan pada terselenggaranya pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

RPJP Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2005–2025 disusun dengan pendekatan perencanaan politik, teknokratik, partisipatif dan dengan arah dari atas ke bawah (*top down*) serta dari bawah

ke atas (*bottom up*), dengan mengedepankan proses evaluasi, prediksi dan analisis terhadap faktor – faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan Daerah.

Acuan utama penyusunan RPJP Daerah adalah rumusan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah dengan mendasarkan kepada:

1. Data yang berkaitan dengan indikator kesejahteraan masyarakat;
2. Statistik fungsi-fungsi pemerintahan di bidang sosial budaya;
3. Statistik bidang pemerintahan umum;
4. Data bidang fisik prasarana;
5. Kondisi ekonomi makro daerah.

Karena RPJP Daerah berfungsi sebagai dokumen publik yang merangkum arah pembangunan dua puluh tahunan di bidang pelayanan umum pemerintahan dan pembangunan, maka proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan berbagai unsur pelaku pembangunan (*stake holders*), eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta para pakar akademisi yang berkompeten dengan memperhatikan kebijakan dan program Pemerintah Provinsi dan Nasional.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJP Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan maksud:

1. Untuk memberikan landasan dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Nasional dan visi serta misi Kabupaten Mesuji;
2. Untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mesuji;
3. Untuk menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Mesuji;

Tujuan penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2005-2025 adalah:

1. Menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Mesuji;
2. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah daerah maupun antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

3. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian visi dan misi daerah serta provinsi;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

1.3. LANDASAN HUKUM

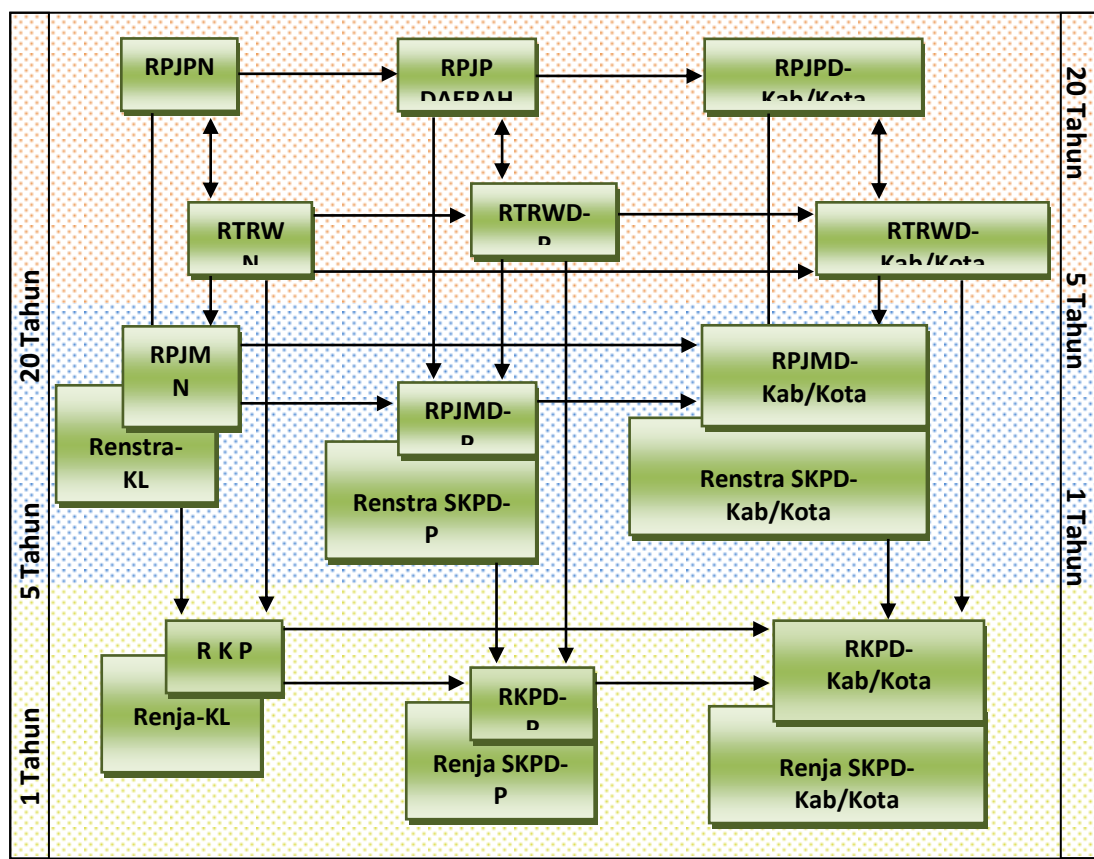
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah menjadi beberapa kali terakhir dan Undang-Undang Perubahan dari Undang-Undang 32 tahun 2004 yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor: 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 8).

1.4. HUBUNGAN RPJP DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Perencanaan pembangunan daerah (*regional development planning*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan kebijakan dan program pembangunan daerah oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta memperhatikan perkembangan nasional.

Dalam perkembangannya, dokumen perencanaan dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah terdiri dari beberapa dokumen yang saling berhubungan dan dipertimbangkan berdasarkan periode pembangunan. Secara rinci hubungan RPJP Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut;



Gambar 1.
Hubungan RPJP DAERAH Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

RPJP Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2005—2025 merupakan dokumen dengan urutan pertama dalam pembangunan daerah yang memuat rencana pembangunan 20 tahun. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Lampung serta memperhatikan RPJP Daerah kabupaten/kota lainnya, serta berpedoman pada RTRW Kabupaten Mesuji dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

Hubungan/keterkaitan antara RPJP Daerah Kabupaten Mesuji 2005-2025 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya diatas dimaksudkan untuk menjamin bahwa :

1. Visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
2. Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, selaras dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten/kota masing-masing;
3. Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota lainnya;
4. Rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW kabupaten/kota lainnya;
5. Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
6. Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional.

Selain itu, RPJP Daerah harus menjadi acuan dalam menyusun perencanaan lima tahunan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Dalam RPJP Daerah telah digariskan mengenai apa yang menjadi prioritas pembangunan lima tahun pertama hingga lima tahun ke empat. Berkaitan dengan hal ini, maka visi, misi kepala daerah yang sekaligus akan menjadi visi, misi dan program kerja di RPJM Daerah maka penjabaran

kebijakan pembangunan ke dalam RPJM Daerah harus mengacu kepada kebijakan RPJP Daerah.

Selanjutnya RPJM Daerah akan dijabarkan ke dalam Rencana Strategis di Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) yang merupakan perencanaan tahunan daerah. Dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah itulah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan masyarakat bisa mengacu sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran setiap tahun. Proses akhir dalam perencanaan disusunlah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pedoman bagi eksekutif dan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Akhir RPJP Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2005–2025 disusun dengan tata urut sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum materi rancangan awal RPJP Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta aspek-aspek indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bagian ini menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang menjadi dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah.

BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH

Bagian ini menyajikan visi dan misi dalam dokumen RPJP Daerah yang menggambarkan keadaan atau cita-cita yang diinginkan dari hasil pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun mendatang.

BAB V. ARAH KEBIJAKAN

Dalam bagian ini diuraikan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah berdasarkan setiap misi untuk merumuskan arah kebijakan, pentahapan pembangunan 5 (lima) tahunan selama 20 (dua puluh) tahun dan prioritas masing-masing tahapan.

BAB VI. KAIDAH PELAKSANAAN

Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah pelaksanaan dari visi misi dan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen RPJP Daerah.

BAB VI. PENUTUP

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Geografis

Secara geografis wilayah Kabupaten Mesuji terletak pada 3°45' – 4°40' arah Utara-Selatan dan 106°15' – 107°00' arah Timur-Barat. Kabupaten Mesuji mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Rawa Jitu Selatan dan Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang, serta Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan UU Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji memiliki luas 218.400 hektare terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Mesuji;
2. Kecamatan Mesuji Timur;
3. Kecamatan Tanjung Raya;
4. Kecamatan Panca Jaya;
5. Kecamatan Simpang Pematang;
6. Kecamatan Way Serdang;
7. Kecamatan Rawa Jitu Utara.

Secara topografi, wilayah Kabupaten Mesuji dapat dibagi dalam 4 unit topografi, sebagai berikut:

- a. Daerah dataran yang dimanfaatkan untuk perkebunan.
- b. Daerah rawa, terdapat disepanjang pantai Timur dengan ketinggian 0 – 1 M yang merupakan daerah rawa yang dimanfaatkan untuk area persawahan, meliputi wilayah Kecamatan Mesuji Timur, dan Rawajitu Utara;

- c. Daerah River Basin, terbatas dua *River Basin* yang utama yaitu *River Basin Mesuji* dan *River Basin* sungai kecil lainnya. Pada areal *River Basin* Sungai Mesuji dan anak-anak sungai lainnya membentuk pola aliran sungai yang umumnya merupakan sungai-sungai kampung; dan
- d. Daerah Aluvial meliputi pantai sebelah timur yang merupakan bagian hilir (*down stem*). Dan sungai besar yaitu sungai Mesuji, dapat digunakan untuk pelabuhan

Geologis wilayah Kabupaten Mesuji tersusun dari formasi geologi Aluvium (Qa), Endapan Rawa (Qs), dan formasi Muara Enim (Tm_{pm}). Data geologi dapat diketahui adanya bahan tambang (endapan mineral) diantaranya:

1. Minyak bumi di Sritanjung Kecamatan Tanjung Raya;
2. Batubara muda di Fajar Bulan, Adi Rukun Kecamatan Panca Jaya; Tri Karya Mulya, Harapan Mukti dan Berabasan Kecamatan Tanjung Raya; dan Mesuji;

Keberadaan air di Kabupaten Mesuji amat melimpah dimana daerah aliran Sungai yang ada diantaranya Way Buaya, Way Tulungan Hilir, Way Tulungan Tengah dan Way Tulungan Hulu. Berdasar Data Jaringan Tata Air Rawa Mesuji Atas memiliki luas baku 18.200 ha, luas fungsi 11.000 ha, tanggul penahan banjir 59,6 km, saluran pembuangan kolektor 60,56 km, saluran pembuangan tersier mencapai 315,97 km.

Iklim merupakan salah satu faktor lingkungan yang sangat berpengaruh Musim kemarau didaerah ini terjadi pada bulan Juni sampai Oktober, sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan Mei. Pada tahun 2008, suhu udara rata-rata berkisar antara 26,0 – sampai 28,0°C, sedangkan rata-rata curah hujan berkisar antara 175 mm.

Deskripsi wilayah tanah kering dan luas area yang ada di Kabupaten Mesuji terbagi atas area pekarangan seluas 99.049 ha, tegal/kebun 46.990 ha, ladang/huma padang rumput 248 ha, hutan rakyat 618 ha, kolam, tebat, tambak dan rawa seluas 9.719 ha, tanah kering tak diusahakan seluas 18.256 ha, hutan negara 925 ha, perkebunan seluas 96.980 ha, dan yang tidak diusahakan seluas 58.734 ha dari 331.519 ha area yang ada di Kabupaten Mesuji.

Potensi wilayah pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan masih amat terbuka mengingat luas lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal 58.734 ha dan luas perkebunan 96.980 ha bila dipersentase luas wilayah Kabupaten

Mesuji yang masih memiliki potensi sebagai wilayah pertanian dan perkebunan 60% dari luas keseluruhan.

Pada tahun 2010-2011 hasil luas lahan pertanian meliputi berbagai komoditi padi-padian, kacang dan umbian dengan luas keseluruhan 54.708 ha. Meliputi padi sawah 28.516 ha (52,12%) terluas di Kecamatan Rawajitu Utara; Padi Gogo seluas 2.120 ha (3,88%) terluas di Kecamatan Way Serdang; Jagung seluas 7.706 ha (14,09%) terluas di Kecamatan Mesuji; Kedelai seluas 178 ha (0,33%) terluas di Kecamatan Mesuji Timur; Ubi Kayu seluas 15.651 ha (28,61%) terluas di Kecamatan Simpang Pematang; Ubi Jalar seluas 196 ha (0,36%) terluas di Kecamatan Way Serdang; Kacang Tanah 215 ha (0,39%) terluas di Kecamatan Simpang Pematang dan Kacang Hijau seluas 126 ha (0,23%) terluas di Kecamatan Simpang Pematang.

Produksi padi sawah tahun 2011 mencapai 70.402 kw, terbanyak di Kecamatan Rawa Jitu Utara sebanyak 33.225 kw. Padi Gogo sebanyak 484 kw, dengan produksi terbanyak di Kecamatan Mesuji mencapai 458 kw. Ubi Kayu produksinya mencapai 3.573.329 kw, dengan produksi terbanyak di Kecamatan Simpang Pematang mencapai 1.797.058 kw.

Luas areal perkebunan rakyat meliputi komoditi karet, kopi, sawit, dan lada pada tahun 2010 memiliki seluas 34.427 ha. Komoditas perkebunan yang banyak masyarakat adalah karet seluas 18.145 hektare, terluas di Kecamatan Way Serdang, dan sawit seluas 16.141 hektare, terluas di Kecamatan Way Serdang.

Produksi karet pada tahun 2010 mencapai 1.549.456 ton, terbanyak di Kecamatan Simpang Pematang sekitar 700.000 ton. Sedangkan produksi sawit sebanyak 208.651 ton, terbanyak di kecamatan Way Serdang sekitar 111.780 ton.

Berdasarkan data tahun 2011 menunjukkan pemanfaatan lahan inti dan plasma perusahaan yang ada di Kabupaten Mesuji telah diusahakan dengan penuh. Dimana Jumlah potensi dan pemanfaatan pengembangan perkebunan besar swasta 52.161 ha, yang terdiri dari luas areal plasma 9.070,68 ha dan inti 34.593 ha dengan peluang HGU yang masih ada seluas 8.495 hektare. Luas perkebunan besar swasta di Kabupaten Mesuji tahun 2011 memiliki luas areal tanaman menghasilkan 43.665,63 ha yang terbagi dalam 8 perusahaan dengan luas areal berbeda dengan total produksi 919.489,91 ton pertahun.

Sub sektor peternakan, menunjukkan populasi ternak pada tahun 2010 diantaranya: Sapi 14.620 ekor, Kerbau 669 ekor, sedangkan tahun 2011 populasi Sapi turun menjadi 11.433 ekor dan Kerbau hanya 133 ekor. Populasi ternak kecil tahun 2010,

Kambing/Domba 26.083 ekor, Babi 2.340 ekor. Sedangkan tahun 2011 Kambing 27.108 ekor, Domba 577 ekor, dan Babi 2.105 ekor.

Populasi ternak unggas pada tahun 2010 untuk Ayam Ras 7.500 ekor, Ayam Buras 159.339 ekor, Bebek/itik 20.433 ekor. Pada tahun 2011 terjadi peningkatan populasi untuk Ayam Ras 15.000 ekor, Ayam Buras 159.451 ekor, dan Bebek/itik 33.989 ekor.

Daerah aliran sungai di Kabupaten Mesuji mendukung bagi pengembangan potensi perikanan dan menjadi salah satu daya tarik investasi. Pada tahun 2011 dari potensi 4.000 unit Keramba Sangkar baru dimanfaatkan sebanyak 300 unit dan dari 60 ha kolam baru dimanfaatkan seluas 1 hektare saja. Dengan demikian potensi sarana perikanan masih sangat terbuka.

Wilayah Kabupaten Mesuji sebagian besar adalah areal perkebunan dan melimpahnya sumberdaya air oleh karenanya destinasi wisata yang menjadi andalan adalah potensi wisata agro diantaranya wisata agro perkebunan jeruk di Kecamatan Tanjung Raya dan Kecamatan Mesuji serta potensi wisata bahari yaitu Danau Wirabangun (Pantai Dono), wisata pemancingan dan dayung perahu.

Potensi hutan yang ada di Kabupaten Mesuji terdiri dari hutan rakyat dan hutan tanaman industri. Hutan rakyat merupakan hutan yang diusahakan oleh penduduk dengan sumberdaya yang dimiliki tanpa bantuan pihak lain dimana hasilnya dikelola oleh masyarakat sendiri, hutan tanaman industri merupakan hutan yang dikelola dan dikuasai oleh perusahaan swasta ataupun perusahaan milik negara dengan tujuan mempertahankan ekosistem lingkungan dan pemanfaatan hutan untuk kepentingan keuntungan perusahaan pengelola. Data tahun 2010 menunjukkan bahwa hutan rakyat di Kabupaten Mesuji seluas 2.600 ha dan luas hutan tanaman industri 42.762 ha.

Perindustrian besar yang telah beroperasi di Kabupaten Mesuji sebanyak 8 perusahaan yang bergerak di pengolahan hasil perkebunan dan pertanian. Khusus industri yang mengolah hasil perkebunan sawit diantaranya PT. Tunas Bangsa Lampung, PT. Lampung Inter Pertiwi dan PT. Garuda Bumi Perkasa dengan total kapasitas produksi CPO (*crude palm oil*) 2.894,4 ton/tahun.

Bahan tambang terkandung yang mempunyai potensi untuk penambangan yang berada di wilayah Kabupaten Mesuji antara lain : 1) Minyak Bumi potensi minyak bumi terdapat di wilayah Kabupaten Mesuji, 2) Gas Alam potensi gas alam terdapat di Kampung Tanjung Mulya, Kampung Pangkal Mas Mulya, Kampung Pangkal Mas Jaya dan Kampung Muara Mas,

3) Batubara Potensi Batubara di Desa Mekar Sari Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. 4) pasir di Kecamatan Mesuji, Kecamatan Way Serdang, Kec. Serdang

2.1.2.Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Mesuji berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Mesuji berjumlah 187.407 jiwa, terdiri dari laki-laki berjumlah 98.399 jiwa dan perempuan berjumlah 89.008 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 10 tahun (2000—2010) sebesar 1,17%. Namun jumlah penduduk Mesuji berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Capil Tahun 2011 berjumlah 255.202 jiwa terdiri dari laki-laki 134.556 jiwa dan perempuan 120.646 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 35,28%. Dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 70.933 KK.

Rata-rata kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Mesuji yaitu 109 jiwa/km². Distribusi kepadatan penduduk tidak merata tiap-tiap kecamatan, yaitu kisaran kepadatan 44—260 jiwa/km². Wilayah kecamatan terpadat penduduknya adalah Way Serdang sebanyak 260 jiwa/km² sedangkan kecamatan terjarang penduduknya adalah kecamatan Mesuji Timur hanya 43,7 jiwa/km².

Wilayah rawan bencana yang ada di Kabupaten Mesuji umumnya adalah rawan banjir karena berdekatan dengan sungai besar dan kecil maupun kondisi geografisnya yang rendah, dan rawan kebakaran khusus wilayah Kecamatan Simpang pematang. Wilayah rawan bencana (banjir) menurut data Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran (BPBK) Kabupaten Mesuji berada di seluruh kecamatan. Jumlah penduduk yang ebrada di daerah rawan bencana (banjir) yaitu Mesuji Timur sebanyak 10.283 jiwa; Mesuji sebanyak 19.953 jiwa; Tanjung Raya sebanyak 3.196 jiwa; Rawa Jitu Utara sebanyak 21.194 jiwa; Panca Jaya 277 jiwa; Simpang Pematang 14.055 jiwa dan Way Serdang 5.899 jiwa.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1.Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Dari tahun 2008 hingga 2010 kontributor utama PDRB Kabupaten Mesuji adalah sektor yaitu rata-rata 60,69%, kemudian sektor industri pengolahan rata-rata 15,99%, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran rata-rata 13,47%. Sektor yang

memberikan kontribusi terendah adalah sektor listrik, gas dan air hanya 0,01% dan sektor pertambangan dan penggalian sekitar 0,21%.

Berdasarkan data tersebut terdapat tiga sektor basis yang menjadi andal adalah Kabupaten Mesuji yaitu Pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan, hotel dan restoran. Dari tiga sektor basis tersebut yang menunjukkan tren terbaik pertumbuhannya adalah sektor industri pengolahan.

Laju pertumbuhan per sektor dalam PDRB Tahun 2009-2010 atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Mesuji menunjukkan tingkat perkembangan kontribusi yang begitu berarti pada sektor transportasi dan komunikasi yang meningkat rata-rata sekitar 25,26% kemudian sektor industri pengolahan tumbuh rata-rata sekitar 17,63%. Sedangkan yang menunjukkan *tren* pertumbuhan negatif yaitu sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan rata-rata minus 3,57%, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami trsn negatif rata-rata minus 1,86%. Sementara hampir semua sektor selain keuangan dan perdagangan, menunjukkan trend positif atau meningkat.

PDRB Perkapita Kabupaten Mesuji tahun tahun 2008--2010 berada pada peringkat ke 2 jika dibandingkan dengan PDRB Perkapita daerah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung pada tahun yang sama. Pada tahun 2008 PDRB Perkapita Kabupaten Mesuji hanya sebesar Rp13.173.950 rupiah, sedangkan PDRB Perkapita tahun 2010 diperkembangkan sebesar Rp 16.861.877.

Dengan target pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 7,5% pertahun dan peningkatan pendapatan rata-rata penduduk hingga mencapai sekitar US\$ 6.000 pada tahun 2025 dapat dilakukan estimasi terhadap besaran PDRB Kabupaten Mesuji hingga tahun 2025. Untuk estimasi terhadap PDRB Kabupaten Mesuji Adhb maka terlebih dahulu dihitung besarnya rata-rata pertumbuhan PDRB Adhb sehingga jika dibagi dengan penduduk tahun 2025 diperoleh PDRB Perkapita berkisar pada angka 60 juta (target pendapatan rata-rata penduduk sebesar US\$ 6.000, dengan asumsi US\$ 1 adalah 10 ribu rupiah). Dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,5% setiap tahunnya maka PDRB Kabupaten Mesuji tahun 2015 atas dasar harga konstan (Adhk) diestimasikan sebesar 1.934.678,2 (juta rupiah). PDRB Kabupaten Mesuji pada tahun 2020 Adhk diestimasikan mengalami peningkatan sebesar 842.802,54 (juta rupiah) sehingga menjadi sebesar 2.777.480,7 juta rupiah pada tahun 2020. PDRB Kabupaten Mesuji tahun 2025 Adhk diestimasikan

kembali mengalami peningkatan hingga sebesar 1.209.952 (juta rupiah) sehingga menjadi sebesar 3.987.433 (juta rupiah) pada tahun 2025.

2.2.2.Fokus Kesejahteraan Sosial

Pada Tahun 2010 Angka Melek Huruf (AMH) penduduk berumur 10 Tahun ke atas di Kabupaten Mesuji rata-rata 92,56%, laki-laki 96,48 % dan perempuan 87,81% perempuan

Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak bersekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan.

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas menurut jenis kelamin dan Ijasah STTB Tertinggi yang dimiliki di Kabupaten Mesuji Tahun 2010 terdapat 42,89% penduduk tidak memiliki ijasah SD, 22,10% memiliki ijasah SD/ sederajat, 12,37% memiliki ijasah SLTP dan 15,10% memiliki ijasah SLTA sederajat.

2.2.3.Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Disamping penduduk asli suku Lampung, suku Banten, Suku Bugis, Jawa, Bali juga menetap di wilayah Kabupaten Mesuji. Suku-suku ini masuk secara massif kesana sejak Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1905 memindahkan orang-orang dari Jawa dan ditempatkan di hampir semua daerah. Kebijakan ini terus berlanjut hingga 1979, batas akhir secara resmi dinyatakan tidak lagi menjadi daerah transmigrasi. Namun, pertumbuhan penduduk yang berasal dari pendatang pun tetap saja tidak terbendung setiap tahunnya. Beberapa kampung tergabung dalam satu marga, sedangkan kampung itu sendiri terdiri atas beberapa buway. Di setiap buway atau gabungan buway terdapat rumah besar yang disebut Nuwow Balak biasanya Nuwow Balak ini merupakan rumah dari kepala kerabat yang merupakan kepala pimpinan klan dan kepala kebuwayan tersebut, yang disebut juga punyimbang bumi.

Nilai-nilai budaya masyarakat ini bersumber dari falsafah *pül pesanggiri*, yang terdiri dari harga diri, prilaku, dan sikap hidup :

- a. *Nengah nyapur* (hidup bermasyarakat, membuka diri dalam pergaulan)
- b. *Nemui nyimah* (terbuka tangan, murah hati dan ramah pada semua orang)
- c. *Berjuluk Beadek* (bernama, bergelar, saling menghormati)
- d. *Sakai Sambayan* (gotong royong, tolong menolong)

Upaya pembangunan seni budaya dan olah raga di Kabupaten Mesuji tidak hanya pada pengembangan seni budaya lokal

namun juga pengembangan seni budaya masyarakat pendatang mencakup seni moderen. Perkumpulan seni drama dan musik terdapat 20 perkumpulan pada tahun 2009 dan berkembang menjadi 29 perkumpulan pada tahun 2010, perkembangan seni wayang pada tahun 2009 sebanyak 3 perkumpulan dan tahun 2010 menjadi 5 perkumpulan sedangkan jumlah perkumpulan seni tari tahun 2009 sebanyak 20 kelompok dan menjadi 36 perkumpulan tahun 2010. Pembangunan keolahragaan di Kabupaten Mesuji meliputi berbagai cabang olah raga diantaranya sepakbola memiliki 106 perkumpulan pada tahun 2009 dan menjadi 229 perkumpulan tahun 2010. Tiga cabang olah raga dengan perkumpulan terbanyak yaitu: sepak bola 66 perkumpulan, bola voli 65 perkumpulan dan bulu tangkis 49 perkumpulan.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Pendidikan

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah per 1.000 penduduk. APS menurut usia sekolah di Kabupaten Mesuji Tahun 2010 pada penduduk usia 7-12 tahun mencapai 96,72; usia 13-15 tahun mencapai 63,20; dan usia antara 16-18 tahun mencapai 16,66.

Jumlah sekolah dasar yang tersebar di Kabupaten Mesuji terdapat 116 sekolah dasar negeri dan swasta, sedangkan jumlah penduduk usia sekolah 25.788 orang sehingga per sekolah diharuskan menampung 222 siswa sekolah dasar, sedangkan sekolah menengah pertama sebanyak 43 sekolah negeri dan swasta, rasio ketersediaan sekolah SLTP sebesar 240 siswa persekolah. Ketersediaan sekolah pada tahun 2009/2010 relatif baik, dengan angka daya tampung per sekolah yang relatif sedang sehingga tidak dibutuhkan penambahan jumlah sekolah yang perlu di tingkatkan kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Mesuji.

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Rasio guru dan murid pada jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2006 hanya sebesar 6,69 sedangkan pada tahun 2010

telah mencapai 30,5 yang menandakan peningkatan jumlah murid sementara jumlah guru relatif tetap. Rasio guru murid jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun 2006 sebesar 5,21 dan tahun 2010 telah mencapai 22,4. Ini juga menandakan terjadi penambahan jumlah murid SMP/ sederajat, sementara jumlah guru tetap.

Rasio guru dan murid pada jenjang pendidikan menengah pada tahun 2008 sebesar 7,15 sedangkan pada tahun 2010 telah mencapai 11. Ini menandakan peningkatan jumlah murid sementara jumlah guru relatif tetap.

2.3.2.Kesehatan

Keberadaan puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) di Kabupaten Mesuji menunjukkan tingkat pelayanannya terhadap penduduk. Rasio puskesmas per 100.000 penduduk dan rasio puskesmas pembantu (pustu) per 125.000 penduduk. Untuk puskesmas menunjukkan rasio sebesar 3,72 dengan Kecamatan dengan rasio tertinggi yaitu Panca Jaya sebesar 5,64, sedangkan rasio puskesmas pembantu sebesar 13,92 dengan rasio tertinggi di Kecamatan Rawa Jitu Utara sebesar 20,58.

Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter di Kabupaten Mesuji tahun 2011 sebanyak 18 dokter untuk melayani penduduk sebanyak 255.202 jiwa. Sehingga rasio rata-rata hanya 0,22. Jumlah dokter terbanyak berada di Kecamatan Pancajaya ada 4 dokter dengan rasio 0,56; Kecamatan Simpang Pematang dan Mesuji Timur masing-masing 3 orang dokter dengan rasio antara 0,18-0,25.

Sementara ketersediaan tenaga kesehatan (paramedis) merupakan seberapa besar jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Mesuji yang berprofesi sebagai paramedik dan memberikan pelayanan medis per 2.500 penduduk. Jumlah tenaga medis yang ada di Kabupaten Mesuji sejumlah 177 orang sedangkan yang bertugas di puskesmas sebanyak 160 orang sehingga rasionya adalah 1,66. Rasio paramedis tertinggi adalah di Kecamatan Simpang Pematang sebesar 2,54 sedangkan yang terendah adalah 1,07 di Kecamatan Mesuji.

Derajat Kesehatan

Derajat kesehatan merupakan pencerminan kesehatan perorangan, kelompok maupun masyarakat yang digambarkan dari unsur kualitas hidup serta unsur-unsur mortalitas dan yang mempengaruhinya, yaitu morbiditas dan status gizi. Untuk kualitas hidup, yang digunakan sebagai indikator adalah Angka Harapan Hidup Waktu Lahir (Lo). Sedangkan untuk mortalitas telah disepakati lima indikator yaitu Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 kelahiran hidup, angka kematian pneumonia pada balita per 1000 balita, angka kematian diare pada balita per 1000 balita dan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) per 100.000 penduduk, angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 Penduduk, angka kesakitan malaria per 1000 penduduk, persentase kesembuhan TB Paru, prevalensi penderita HIV/AIDS terhadap penduduk beresiko dan angka "*Acute Flaccid Paralysis*" (AFP) pada anak usia <15 tahun per 100.000 anak. Untuk status gizi telah disepakati empat indikator yaitu persentase bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), persentase anak balita dengan gizi baik, prevalensi anemia gizi dan prevalensi Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY).

o Angka Kematian Bayi/Infant Mortality Rate (AKB/IMR)

Berdasarkan laporan Angka Kematian Bayi (AKB) di Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji pada tahun 2009 terjadi penurunan kasus kematian bayi, yang semula terjadi pada 4 kecamatan dengan 21 kasus, turun menjadi 20 kasus. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2010 sebesar 12,9 per 1.000 KH.

Tiga dari tujuh kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Mesuji yaitu kecamatan Mesuji Timur, Kecamatan Way Serdang dan Kecamatan Rawa Jitu Utara merupakan daerah yang rentan terjadinya kematian bayi.

Laporan Angka Kematian Bayi (AKB) di Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji pada tahun 2011 sebesar 1,3 per 1.000 KH. Angka Kematian Bayi (AKB) tersebut tersebar pada 3 kecamatan di Kabupaten Mesuji yaitu Kecamatan Mesuji Timur 3 bayi, Kecamatan Way Serdang 3 bayi, dan Kecamatan Rawajitu Utara 1 bayi.

Rata-rata anak lahir hidup menurut kelompok usia ibu di Kabupaten Mesuji tahun 2010 angka rata-rata anak lahir hidup sebesar 2,65 kelahiran terentang dialami oleh usia ibu diatas 35 tahun keatas berkisar 2,72 sampai 3,89 perkelahiran.

- **Angka Kematian Balita/AKABA**

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak umur 0-<5 tahun per 1000 kelahiran hidup. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi dan kecelakaan. Estimasi angka kematian balita di Indonesia yang dihitung dari data Badan Pusat Statistik menunjukkan penurunan yang cukup berarti.

Pada tahun 2009, persentase Angka Kematian Balita di Kabupaten Mesuji adalah 0,46%, yaitu terjadi di Kecamatan Mesuji Timur ditemukan 3 kasus. Untuk tahun 2010, persentase Angka Kematian Balita sudah berkurang menjadi 0,0129%.

Namun, pada tahun 2011 Angka Kematian Balita meningkat menjadi 1,6% per 1000 Kelahiran Hidup. Hal ini mungkin terjadi akibat kurangnya kepedulian masyarakat (orangtua balita) terhadap pemeriksaan kesehatan balita di posyandu secara berkala.

- **Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)**

Angka Kematian Ibu Maternal (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. AKI sampai saat ini baru diperoleh dari survey-survey terbatas.

Tinggi rendahnya kasus kematian ibu dipengaruhi oleh sistem pencatatan dan pelaporan secara aktif dan pasif. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Mesuji Pada tahun 2010 terdapat 3 kasus dari 4.596 ibu hamil, yaitu di Kecamatan Mesuji Timur 1 Ibu dan Kecamatan Panca Jaya 2 Ibu sehingga Angka Kematian Ibu Maternal (AKI) di Kabupaten Mesuji tahun 2010 sebesar 96,7 per 100.000 Kelahiran Hidup.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Seksi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji, Angka Kematian Ibu di Kabupaten Mesuji tahun 2011 meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 7 kasus dari 4.767 ibu hamil, yaitu di Kecamatan Simpang Pematang 1 Ibu, Kecamatan Panca Jaya 4 Ibu, dan 2 Ibu di Kecamatan Rawajitu Utara. Sehingga Angka Kematian Ibu Maternal (AKI) di Kabupaten Mesuji menjadi 155,5 per 100.000 Kelahiran Hidup. Kasus yang terjadi seluruhnya adalah kasus kematian ibu nifas, sedangkan untuk ibu bersalin dan melahirkan tidak terdapat kasus.

- **Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit “Acute Flaccid Paralysis” Per-100.000 Penduduk < 15 Tahun (MDG)**

Tahun 2009 di Kabupaten Mesuji tidak ditemukan kasus AFP. Namun, pada tahun 2010 Angka Kesakitan AFP kembali muncul sebesar 1,27 per 100.000 penduduk usia <15 tahun.

Pada tahun 2011, berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang P2PL Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji, Angka Kesakitan AFP pada 21.767 penduduk usia <15 tahun adalah nol atau dengan kata lain tidak ditemukan kasus.

- **Prevalensi Tuberkulosis (MDG)**

Penyakit TB Paru di Kabupaten Mesuji masih menjadi masalah kesehatan karena menyerang pada semua kelompok, persentase kasus tertinggi pada kelompok umur produktif dan penemuan penderita TB dengan Basil Tahan Asam (BTA) positif masih rendah.

Penanggulangan TB Paru dilaksanakan dengan Strategi *DOTS*. Sesuai dengan rekomendasi WHO yang terdiri atas 5 komponen yaitu *Komitmen politis, diagnosis TB dengan mikroskopis, PMO, kesinambungan ketersediaan OAT dan pencatatan pelaporan yang baik dan benar*.

Penemuan kasus TB Paru BTA Positif di kabupaten Mesuji pada tahun 2010 sebanyak 76 kasus (IR 41,4 per 100.000 penduduk) dengan angka kesembuhan sebesar 85,53 % (65 dari 76 kasus yang diobati).

Sedangkan pada tahun 2011, Angka Prevalensi Tuberkulosis sebesar 42,71 per 100.000 penduduk dengan tingkat kematian rendah yaitu 1,96 per 100.000 penduduk.

- **Persentase HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual Ditangani dan Diobati**

Pada tahun 2011 di Kabupaten Mesuji ditemukan 1 kasus baru HIV di Kecamatan Way Serdang. Untuk penyakit Infeksi Menular Seksual terdapat 14 kasus yang tersebar di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Way Serdang tepatnya di wilayah kerja Puskesmas Bukoposo sebanyak 7 kasus, dan di Kecamatan Mesuji sebanyak 7 kasus yang terbagi berdasarkan jenis kelamin yaitu 4 laki-laki dan 3 perempuan. Namun, tidak terdapat kasus kematian akibat HIV, AIDS, dan Infeksi Menular Seksual Lainnya.

- **Darah Donor Diskrining Terhadap HIV**

Untuk darah donor diskriminasi terhadap HIV di Kabupaten Mesuji tidak terdapat datanya, hal ini dikarenakan sampai dengan tahun 2011 ini Kabupaten Mesuji belum memiliki Kantor PMI (Palang Merah Indonesia) sendiri sehingga tidak terdapat unit transfusi darah.

○ **Kasus Diare Ditangani**

Penyakit diare sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, walaupun secara umum angka kesakitan masih fluktuatif. Kecenderungan angka kesakitan (Insidens Rate/IR) diare di masyarakat (th 2001-2004) berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang masih berkisar antara 17,6-33,9 per 1.000 penduduk berfluktuasi naik turun (angka ini masih di atas angka Propinsi Lampung sebesar 10-16 per 1.000 penduduk namun masih dibawah angka nasional sebesar 220-280 per 1.000 penduduk).

Berdasarkan hasil surveillance Seksi Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji tahun 2011 diperkirakan penderita diare sebanyak 10.795 kasus dari 255.202 jiwa penduduk Kabupaten Mesuji secara keseluruhan, dengan persentase penderita yang ditangani 52,54% (5.672 kasus).

○ **Prevalensi dan Persentase Penderita Kusta Selesai Berobat**

Di kabupaten Mesuji pada tahun 2009 ditemukan 14 penderita kusta dengan persentase penderita kusta yang selesai diobati (RFT Rate) sebanyak 8 kasus (57,14%).

Pada tahun 2010 di Kabupaten Mesuji ditemukan 12 penderita kusta dengan persentase penderita kusta yang selesai berobat (RFT Rate) sebanyak 10 orang.

Pada tahun 2011 ditemukan 3 penderita kusta yang terdiri dari 2 kasus PB (*Pausi Basiler*) dan 1 kasus MB (*Multi Basiler*), dengan Angka Prevalensi 0,16 per 10.000 penduduk.

○ **Jumlah Kasus Penyakit Menular Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)**

Pada tahun 2009 di Kabupaten Mesuji ditemukan kasus Hepatitis Klinis sebesar 35 kasus yang terdapat di empat kecamatan dari tujuh kecamatan di Kabupaten Mesuji (yaitu di kecamatan Mesuji Timur 2 kasus, kecamatan Mesuji 5 kasus, kecamatan Simpang Pematang 4 kasus dan kecamatan Way Serdang 24 kasus), Campak sebesar 2 kasus yaitu di Kecamatan Mesuji dan Hepatitis B sebanyak 1 kasus di Kecamatan Simpang Pematang. Sedangkan penyakit Tetanus Neonatorum, Tetanus, Pertusis, Dipteri dan Polio tidak ada ditemukan kasus.

Sedangkan pada tahun 2010 di Kabupaten Mesuji sama sekali tidak ditemukan kasus penyakit Hepatitis B, Tetanus, Pertusis, Tetanus Neonatorum, Difteri, Campak maupun Polio.

Tahun 2011, untuk penyakit Difteri, Pertusis, Tetanus, Polio, dan Hepatitis B tidak ditemukan kasus. Namun untuk penyakit Campak ditemukan 19 kasus yang tersebar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Way Serdang 4 kasus, Kecamatan Simpang Pematang 2 kasus, Kecamatan Mesuji Timur 11 kasus, dan Kecamatan Rawajitu Utara 2 kasus. Dengan *Case Fatality Rate* (CFR) 0% atau dengan kata lain tidak terdapat kasus kematian untuk penyakit campak di Kabupaten Mesuji tahun 2011.

- **Angka Kesakitan dan Kematian Demam Berdarah Dengue (DBD)**

Pada tahun 2010, pada Kabupaten Mesuji (Kecamatan Mesuji, Simpang Pematang, Rawajitu Utara, Pancajaya, Mesuji Timur, Tanjung Raya dan Way Serdang) tidak ditemukan kasus DBD.

Sedangkan pada Tahun 2011, Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) ditemukan sebanyak 8 kasus (3,13 per 100.000 penduduk) dengan rincian 2 kasus berasal dari Kecamatan Way Serdang, 5 kasus kecamatan Simpang Pematang, 1 kasus Kecamatan Mesuji, dan untuk Angka Kematian (CFR) tidak ditemukan kasus (0%).

- **Angka Kesakitan dan Kematian Malaria Per-1.000 Penduduk**

Kasus malaria di Kabupaten Mesuji tahun 2008 sebesar 1.813 kasus Klinis (MoMi 9,95 per 1.000 penduduk), sedangkan kasus positif malaria sebanyak 159 kasus (MoPi 0,87 per 1.000 penduduk).

Gambaran insiden malaria di Kabupaten Mesuji menggunakan indikator MoMi (*Monthly Malaria Indeks*) yang berdasarkan pada kasus-kasus klinis. Jika dilihat selama satu tahun terakhir angka MoMi cenderung fluktuatif dan yang paling tinggi untuk Tahun 2011 kembali terjadi di Kecamatan Panca Jaya sebesar 4,44 per 1000 penduduk.

Sedangkan angka kesakitan malaria positif dengan indikator MoPi (*Monthly Parasite Indeks*) yang berdasarkan pada kasus-kasus klinis yang dikonfirmasi laboratorium dan dinyatakan positif plasmodium, berdasarkan grafik di atas, terdapat di beberapa Kecamatan, yaitu Kecamatan Way Serdang sebesar 0,96 per 1.000 penduduk, Kecamatan Simpang Pematang 3,41 per 1.000 penduduk, Kecamatan Tanjung Raya 1,21 per 1.000 penduduk,

Kecamatan Mesuji Timur 0,35 per 1.000 penduduk, dan Kecamatan Rawajitu Utara 0,86 per 1.000 penduduk.

Fluktuatif insidens malaria disamping disebabkan perubahan cuaca secara global juga dikarenakan adanya perubahan lingkungan seperti tambak-tambak udang yang terlantar, pembukaan hutan, perkebunan, penerbangan hutan bakau, perilaku penduduk, kualitas program yang menurun akibat anggaran yang terbatas, mengingat kabupaten Mesuji merupakan DOB, juga disebabkan resistensi obat malaria yang semakin meluas.

Walaupun secara umum MoMi di Kabupaten Mesuji relatif rendah ($<50 \text{ }^{\circ}/_{00}$) termasuk *Low Indisens Area*, akan tetapi beberapa wilayah angka kesakitannya masih cukup tinggi. Daerah-daerah endemis malaria di Kabupaten Mesuji adalah Kecamatan Panca Jaya, Simpang Pematang, dan Rawajitu Utara. Pemetaan daerah endemis malaria belum pernah dilakukan sehingga belum diketahui angka *Prevalensi Rate (PR)* dan *Slide Positive Rate (SPR)* di Kabupaten Mesuji.

Kasus malaria di Kabupaten Mesuji tahun 2010 sebesar 980 kasus Klinis, yaitu di Kecamatan Mesuji Timur 126 kasus, Mesuji 0 kasus, Simpang Pematang 237 kasus, Panca Jaya 155 kasus, Rawajitu Utara 42 kasus, Tanjung Raya 151 kasus dan Way Serdang 269 kasus. Sedangkan kasus positif malaria sebanyak 21 kasus, ditemukan di Kecamatan Mesuji Timur 1 kasus, Mesuji 0 kasus, Simpang Pematang 14 kasus, Panca Jaya 0 kasus, Rawajitu Utara 3 kasus, Tanjung Raya 3 kasus dan Way Serdang 0 kasus.

Kasus malaria Klinis di Kabupaten Mesuji tahun 2011 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 93 kasus, yang tersebar di Kecamatan Panca Jaya 51 kasus, Kecamatan Tanjung Raya 22 kasus, Kecamatan Mesuji Timur 2 kasus, dan Kecamatan Rawajitu Utara 18 kasus. Sedangkan kasus positif malaria meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 258 kasus, ditemukan di Kecamatan Way Seradang 49 kasus, Kecamatan Simpang Pematang 104 kasus, Kecamatan Tanjung Raya 64 kasus, Kecamatan Mesuji Timur 15 kasus, dan Kecamatan Rawajitu Utara 26 kasus.

Status Gizi

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia dan sekaligus dalam pengentasan kemiskinan adalah dengan meningkatkan gizi anak terutama anak balita. Keadaan gizi terutama pada masa balita akan sangat mempengaruhi

tingkat kecerdasan manusia dewasa, karena kecukupan gizi sangat diperlukan dalam pertumbuhan otak terutama pada masa balita dan nantinya akan menghasilkan manusia produktif dan berkualitas.

Perhitungan status gizi dalam Susenas 2001 diukur berdasarkan angka baku WHO-NCHS (*World Health Organization-National Center for Health Statistics*) yang mencakup beberapa variabel pokok seperti propinsi, type daerah, jenis kelamin, umur dan berat badan balita. Dengan menggunakan variabel-variabel tersebut dihitung persentasenya terhadap angka baku dan dikonversikan ke dalam klasifikasi status gizi (buruk, kurang, sedang dan baik) berdasarkan berat badan dan umur anak. Batas ambang yang digunakan untuk keempat status gizi adalah; gizi buruk (dibawah 60 persen baku), gizi kurang (60-69,9 persen baku), gizi sedang (70-79,9 persen baku) dan gizi baik (80 persen baku ke atas).

- **Persentase Berat Bayi Lahir Rendah**

Di Kabupaten Mesuji pada tahun 2011, persentase Berat Bayi Lahir Rendah adalah 1,33% yang terdiri dari 1,39% laki-laki dan 1,27% perempuan. Data tersebut diperoleh berdasarkan hasil perbandingan Jumlah Bayi baru lahir ditimbang yaitu sebesar 4.503 bayi.

- **Persentase Balita dengan Gizi Kurang**

Untuk persentase Balita dengan Gizi Kurang, pada tahun 2011 diperoleh data 0,97% atau 837 bayi gizi kurang dari 86.284 balita yang ditimbang. Dengan jumlah Balita Gizi Kurang terbanyak terdapat di Kecamatan Panca Jaya yaitu 180 balita.

- **Persentase Balita dengan Gizi Buruk**

Di Kabupaten Mesuji pada tahun 2010 di Kabupaten Mesuji ditemukan 4 kasus Gizi Buruk yang tersebar di 3 kecamatan dari 7 kecamatan di Kabupaten Mesuji yaitu Kecamatan Mesuji Timur 1 anak, Kecamatan Rawajitu Utara 2 anak, Kecamatan Rawajitu Utara 1 anak. Kasus Gizi Buruk pada Balita ini tanpa disertai dengan kasus kematian.

Pada tahun 2011 di Kabupaten Mesuji ditemukan 4 kasus Gizi Buruk yang tersebar di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Raya 1 anak, Kecamatan Mesuji Timur 1 anak, dan Kecamatan Rawajitu Utara 2 anak. Kasus Gizi Buruk pada Balita ini tanpa disertai dengan kasus kematian.

2.3.3.Kemiskinan

Berdasarkan laporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2011, angka kemiskinan di Kabupaten Mesuji menyisakan sekitar 8,65% atau sekitar 16.211 jiwa. Persentase angka kemiskinan ini merupakan yang terkecil dibandingkan kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Sedangkan menurut data Kecamatan Dalam Angka Tahun 2011 bahwa keluarga pra sejahtera di Kabupaten Mesuji mencapai 17.589 KK atau 24,80%.

Faktor penyebab kemiskinan di Kabupaten Mesuji ditengarai juga turut disebabkan oleh tata kelola kegiatan ekonomi dengan sektor pertanian sebagai pencaharian utama masih dikelola secara tradisional (sub-sisten). Masyarakat/petani hanya berfungsi sebagai produsen bahan mentah (komoditas pertanian) sehingga nilai tambahnya sangat kecil, untuk itu perlu pelibatan petani dalam proses tata niaga, karena nilai tambah yang besar hanya akan dinikmati dalam proses ini. Selain, struktur mata pencaharian utama dengan nilai tambah yang kecil, hal lain yang turut berkontribusi terhadap kemiskinan adalah lemahnya daya dukung sarana dan prasarana publik.

Keterbatasan infrastruktur perekonomian turut mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat karena prasarana tersebut menjadi faktor utama terjadinya transaksi, sehingga antara produksi dengan pemasaran menjadi terhambat. Keberadaan lembaga ekonomi (perbankan dan koperasi) belum sepenuhnya optimal dalam menggerakkan perekonomian khususnya di perkampungan.

2.3.4.Ketenagakerjaan

Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2010 angkatan kerja 54,41 dari penduduk Kabupaten Mesuji terdapat 93,36% yang bekerja dan 6,64 pengangguran.

Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor Usaha/Lapangan Pekerjaan utama di Kabupaten Mesuji 77,16% bekerja di sektor pertanian dan pertambangan, di sektor perdagangan 8,05%, dan sektor industri pengolahan 5,8%.

Angka beban tanggungan merupakan angka yang menunjukkan tingkat beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif antara usia 15-64 tahun terhadap penduduk yang tidak bekerja 65+ atau masih pada usia pendidikan dasar 0-14 tahun. Berdasar data kelompok umur terdapat 64.930 jiwa menjadi beban tanggungan kelompok usia produktif 120.331 jiwa atau terdapat angka beban tanggungan sebesar 53,96%.

2.3.5. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penyandang masalah kesejahteraan sosial memiliki berbagai aspek yang ditangani diantaranya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Penyandang masalah kesejahteraan sosial tahun 2009 di Kabupaten Mesuji terbanyak pada Kecamatan Mesuji 8.146 jiwa dan Kecamatan Rawajitu Utara 8.080 jiwa.

2.3.6. Akseptor Keluarga Berencana

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (*akseptor*) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Banyaknya pasangan usia subur (PUS) 39.243 jiwa berdasar jenis kontrasepsi pil 3.865 tahun 2009 dan 11.259 tahun 2010, kontrasepsi suntik 3.757 tahun 2009 dan 3.757 tahun 2010.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan, dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya, domestik, atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita) Kabupaten Mesuji Tahun 2009 menunjukkan untuk jenis makanan sebesar 62% sedangkan non makanan sebesar 38 %. Persentase rata-rata pengeluaran perkapita/bulan menurut jenis makanan padi-padian dan umbian masih mendominasi pengeluaran penduduk sebesar 27,82% yang menandakan lebih banyak pengeluaran penduduk untuk memenuhi kebutuhan pokok.

2.4.2. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Banyaknya Koperasi Primer Anggota dan Volume Usaha Menurut Jenis Koperasi Tahun 2010 menunjukkan jumlah koperasi 52 unit dengan jumlah anggota 9.059 orang dengan volume usaha Rp. 39.639.487.000,-.

Usaha kecil dalam bentuk industri rumah tangga (*home industry*) adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Semakin banyak jumlah UKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM.

Industri rumah tangga (*home industry*) pada tahun 2011 tercatat sebanyak 1.381 unit yang terdiri atas 25 jenis usaha. Jenis usaha terbanyak adalah industri anyaman tikar 376 unit, penggilingan padi 211 unit dan pembuatan batu bata sebanyak 102 unit. Wilayah kecamatan yang paling banyak sebagai tempat usaha industri rumah tangga adalah Tanjung Raya sebanyak 467 unit, Mesuji Timur 350 unit dan Simpang Pematang sebanyak 157 unit.

Sementara jumlah lembaga keuangan mikro mencapai 22 unit dengan jumlah anggota sebanyak 451 anggota dengan modal sekitar Rp209 juta lebih. Sedangkan usaha mikro seperti perdagangan, jasa dan aneka usaha mencapai 5.106 unit.

Sementara untuk sektor perdagangan, pada tahun 2010—2011 berdasarkan penerbitan surat izin usaha perdagangan perkembangan jumlah pedagang besar (PB) dari 2 menjadi 3, pedagang menengah (PM) dari 3 menjadi 5 dan pedagang kecil (PK) dari 119 menjadi 169.

2.4.3.Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Sistem transportasi, merupakan sarana dan prasarana vital dalam memberikan pelayanan untuk pergerakan barang, orang dan informasi baik, dalam konteks internal wilayah ataupun dalam kaitanya dengan daerah yang lebih luas. Melalui penyediaan jaringan jalan, diharapkan mobilitas orang, barang, dan informasi dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Sistem transportasi yang ada saat ini di Kabupaten Mesuji terdiri dari transportasi darat dan transportasi sungai. Oleh karena itu, kondisi eksisting sistem transportasi di wilayah perencanaan akan dibagi berdasarkan kedua jenis tersebut.

Dilihat kondisi perkerasan jalannya, jalan-jalan yang ada di wilayah Kabupaten Mesuji sudah beraspal, barbatu, dan tanah. Fungsi jalan saat ini memiliki 2 (dua) fungsi jalan arteri primer yaitu jalan negara dan provinsi, serta jalan lokal sekunder yaitu jalan kabupaten.

Jaringan jalan arteri atau primer yaitu jaringan jalan yang menghubungkan Kabupaten Mesuji dengan wilayah diluarnya. Kabupaten Mesuji dapat dicapai dari Ibukota Kabupaten Tulang Bawang, Kota Menggala, melalui jalan Lintas Timur Sumatra. Rute yang ditempuh adalah Kota Menggala–Simpang Pematang menggunakan prasarana jalan Regional Lintas Timur Sumatra, kemudian dilanjutkan ke arah Timur dengan rute Simpang Pematang–Berabasan–Margojadi–Wonosari–Tanjung Mas Makmur, yang disebut Jalan Poros dan merupakan jalan berstatus jalan kabupaten dengan kelas jalan adalah kelas III.

Kondisi jaringan jalan Lintas Timur pada bulan juli 2008 sebagian rusak terutama di Kecamatan Banjar Agung, sementara jaringan Jalan Poros seluruhnya dalam kondisi rusak berat sehingga perjalanan menuju Kabupaten Mesuji membutuhkan waktu kurang lebih 4-5 jam dari Kota Menggala (jarak tempuh 117,41 Km).

Berdasarkan informasi yang diperoleh pemerintah daerah, kerusakan jalan poros tersebut terutama dikarenakan beban kendaraan yang melintasi jalan tersebut umumnya melebihi kemampuan jalan. Jalan poros merupakan satu-satunya jalan yang menghubungkan perkebunan dan perkebunan rakyat ke lokasi industri pengolahan, sehingga setiap hari truk pengangkut menggunakan jalan tersebut untuk mengangkut hasil perkebunan ke pabrik pengolahan.

Jaringan jalan lokal sekunder yaitu jaringan jalan yang menghubungkan antar wilayah di Kabupaten Mesuji. Jaringan jalan lokal terdapat di Kabupaten Mesuji umumnya merupakan jaringan jalan yang dibuka pada saat pembukaan kawasan transmigrasi yang merupakan daerah rawa, maka pada saat pembukaan lahan dilakukan pembangunan saluran-saluran air dimana jaringan jalan yang dibangun pada saat itu adalah mengikuti saluran-saluran tersebut.

Kondisi jaringan jalan lokal dalam kondisi rusak berat sehingga perjalanan antar kecamatan menuju pusat Kabupaten Mesuji membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 jam. Panjang prasarana jalan lokal (jalan kabupaten) memiliki panjang 629,36 km.

Kondisi jembatan di wilayah Kabupaten Mesuji umumnya sangat memprihatinkan karena kondisinya yang sangat buruk dan membahayakan penggunaannya. Kondisi tersebut terutama ditemui pada jembatan diatas saluran-saluran internal kawasan, baik saluran primer maupun saluran sekunder. Konstruksi jembatan pada umumnya masih berupa konstruksi kayu dan telah lapuk dimakan usia. Saat ini sedang dilakukan pembangunan jembatan diatas saluran primer yang menghubungkan jalan poros di depan Kantor Kecamatan Mesuji, sepanjang 20 meter yang didanai oleh Dirjen Cipta Karya.

Selain jaringan jalan, persamaan pergerakan yang tersedia di Kabupaten Mesuji adalah sub-terminal tidak resmi yang berlokasi di sebelah Pasar Tanjung Mas Makmur. Sub-terminal ini merupakan tempat pemberhentian angkutan umum berupa bus penumpang yang menghubungkan wilayah perencanaan dengan Ibukota Provinsi.

Sarana pergerakan darat yang telah tersedia di wilayah perencanaan adalah angkutan penumpang berupa bis ukuran sedang (kapasitas penumpang 26 orang) dengan rute Tanjung Mas Makmur-Lampung Timur, TJ Mas Makmur-Pringsewu; Mas Makmur-Raja Basa-Bandar Lampung. Selain angkutan umum, warga umumnya menggunakan sarana transportasi roda dua (motor) dan roda empat (mobil pribadi). Untuk pergerakan

internal sarana non-pribadi yang umumnya digunakan adalah ojek, dimana saat ini tercatat kurang lebih 205 orang pengojek yang beroperasi di Kabupaten Mesuji terutama di Kecamatan Mesuji Timur. Berdasarkan Dinas Perhubungan Kabupaten Mesuji, angkutan darat di wilayah Kabupaten Mesuji terdiri:

- a) Bus AKBP : 32 buah
- b) Truk : 463 buah
- c) Fuso : 39 buah
- d) Pick up : 134 buah

Selain transportasi darat di wilayah Kabupaten Mesuji terdapat sistem transportasi sungai. Memanfaatkan sungai-sungai besar seperti Sungai Mesuji dan Sungai Buaya, transportasi sungai juga memanfaatkan saluran primer kawasan yang bermuara ke Sungai Mesuji. Transportasi sungai selama ini menjadi alternatif transportasi darat, terutama untuk mencapai pasar Tanjung Mas Makmur dari pemukiman sepanjang Sungai Mesuji, karena transportasi sungai ini sangat mempersingkat waktu dan jarak tempuh.

Berdasarkan informasi dari Dinas Kertrans Kab. Tulang Bawang 2007, transportasi air melalui Sungai Mesuji tidak hanya dimanfaatkan oleh warga Mesuji saja, tetapi juga oleh penduduk di UPT Gajah Mati (Kabupaten OKI, Provinsi Sumatra Selatan) untuk pergerakan orang dan barang. Pada hari pasaran umat (Senin dan Kamis) dipasar Tanjung Mas Makmur, kapal motor dengan ukuran lebar 3 -4 meter dan panjang 11 meter dengan daya angkut 5-6 Ton ditambat berjajar di depan pasar dengan jumlah hampar mencapai 50 kapal (Disnakertrans, 2007). Pedagang di Pasar Tanjung Mas Makmur sendiri tidak seluruhnya berdomisili di Desa Tanjung Mas Makmur dan desa sekitarnya, tetapi termasuk pedagang dari Gajah Mati, Sungai Sidang dan Sungai Raso, dengan menggunakan transportasi air (Depnakertrans, 2006)

Dermaga untuk angkutan sungani selama ini masih berupa dermaga sementara. Di saluran primer tidak disediakan dermaga khusus untuk perahu dan kapal motor yang menaik-turunkan penumpang dan barang. Pemilik perahu dan kapal motor hanya menambahkan perahu/kapal motor di depan pasar Tanjung pasar Mas Makmur.

Demikian pula halnya yang terjadi disungai Badak (Kecamatan Mesuji), Wiralaga, dan beberapa desa lainnya di Kec. Mesuji Timur sepanjang sungai Mesuji. Berdasarkan Dinas Perhubungan Kabupaten Mesuji, angkutan sungai terdiri.

- a. Kapal Motor ukuran 20 Gt ke bawah : 1.242 buah

b. Speed boat : 75 buah

Pelayanan jaringan listrik oleh PLN di wilayah Kabupaten Mesuji saat ini belum menjangkau sebagian besar daerah permukiman perdesaan. Pengembangan jaringan listrik di wilayah ini sebagai pengembangan jaringan listrik ke daerah permukiman dan pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan mengikuti jaringan jalan yang ada dan yang akan/sedang direncanakan.

Banyaknya rumah tangga yang belum menggunakan listrik disebabkan karena pelayanan listrik dari PLN terbatas di kabupaten Mesuji dan sekitarnya, Bahkan sebagian rumah tangga menggunakan listrik yang bersumber dari PLTD yang berlokasi di Nipah Kuning. Sementara penduduk yang tidak dilayani oleh PLTD harus menggunakan mesin diesel/genset pribadi atau secara komunal, yang tentunya tidak semua warga mampu untuk menyediakan kebutuhan listrik ini. Listrik non PLN berasal dari mesin diesel/genset yang umumnya dikelola secara komunal dan beroperasi dari pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB setiap harinya namun saat ini di ibukota kabupaten listrik telah menyala 24 jam.

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2010 jumlah rumah tangga yang menjadi pelanggan PLN berjumlah 1.844 unit, non-PLN berjumlah 28.100 unit, dan non-listrik berjumlah 15.844 unit.

Telekomunikasi memegang peranan penting dalam mendorong percepatan arus informasi. Cepatnya arus informasi ini sangat dipengaruhi oleh revolusi teknologi dalam dua bidang penting yakni modernisasi, transportasi, dan telekomunikasi. Semakin pesatnya pembangunan telekomunikasi, khususnya telekomunikasi nirkabel, semakin meningkat pula pembangunan infrastruktur prasarana pendukung seperti menara telekomunikasi.

Berkembangnya telekomunikasi seluler berdampak pada menurunnya pengguna telekomunikasi kabel. Pada tahun 2010 di Kabupaten Mesuji menurut data terdapat ± 2.496 pelanggan telepon rumah. Sedangkan untuk fasilitas Kantor Pos, telepon umum dan wartel belum tersedia secara merata di Kabupaten Mesuji.

Persentase rumah tangga yang mengakses internet berdasarkan lokasi/media akses sebanyak 61,89% di kantor, 24,72% mengakses di rumah. Rumah tangga yang memiliki telepon seluler dengan jumlah nomor HP aktif 1-2 nomor sebanyak 82,42%.

2.4.4. Penataan Wilayah

Hal yang diatur dalam tataruang antara lain;

- a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota dan kawasan strategis Kabupaten/Kota.
- b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota.
- c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Kabupaten/Kota; dan
- d. Kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota

Kewenangan pelaksanaan penataan ruang meliputi penetapan wilayah strategis kabupaten, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut pemerintah daerah Kabupaten/Kota :

- a. Menyebar luaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana inti tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kota; dan
- b. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan : (a) Rencana umum tata ruang; dan (b) rencana rinci tata ruang. Kedua jenis rencana ini ditetapkan dengan peraturan daerah (UU No 26 Tahun 2007). Ketentuan dalam perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota menurut UU No.26 tahun 2007 yang perlu diperhatikan adalah :

- a. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau
- b. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau; dan
- c. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sector informal dan ruang evakuasi bencana yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Ruang terbuka hijau pada wilayah Kabupaten/Kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah Kabupaten/Kota. Distribusi ruang terbuka hijau publik disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang (Pasal 30, UU No.26 tahun 2007). Dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota dilakukan :

- a. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis.
- b. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan
- c. Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis.
- d. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan dis-insentif, serta penggunaan sangsi. Peraturan zonasi ditetapkan dengan peraturan daerah (Pasal 35 dan 36, UU No.26 Tahun 2007)

Penataan ruang Kabupaten melibatkan sejumlah lembaga yang harus saling berkoordinasi, bekerjasama, dan berbagi kewenangan, penugasan dan tanggung jawab agar tujuan penataan ruang dapat terwujud. Lembaga-lembaga yang harus terlibat dalam penataan ruang selain dari instansi pemerintah, juga dari masyarakat dan swasta. Peranan instansi pemerintah, selain sebagai regulator juga sebagai eksekutor dari rencana tata ruang yang telah disepakati atau telah menjadi dokumen resmi dan berkekuatan hukum. Sebagai regulator, sejumlah instansi terkait dilibatkan didalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sebagai eksekutor, instansi pemerintah dalam menjalankan kewenangannya, harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya. Instansi pemerintah yang diidentifikasi terlibat dalam penataan ruang kota adalah : BPN, Bappeda, Badan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata, Perhubungan dan Infokom, PT PLN dan PT Telkom.

- a. BPN merupakan instansi pusat yang sangat menentukan jalannya proses penataan ruang pada setiap Kabupaten/Kota di Indonesia, tidak terkecuali Kabupaten Mesuji. Hal ini karena kewenangan perizinan yang melekat pada institusi ini. Jadi, setiap kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan lebih dari 5 Ha, perizinannya harus melalui BPN.
- b. PT PLN dan PT Telkom merupakan BUMN yang mendapat tugas dan tanggung jawab dari Negara dalam penyediaan dan pengelolaan layanan utilitas dibidang kelistrikan dan telekomunikasi. Pelaksanaan program dan rencana aksi dari kedua BUMN ini sangat menentukan perkembangan kabupaten ini.

- c. Lembaga-lembaga dari pihak swasta yang akan sangat berpengaruh dalam penataan ruang Kabupaten Mesuji adalah para pengembang. Kiprah para pengembangan ini akan sangat berpengaruh terhadap proses penataan ruang Kabupaten Mesuji pada masa-masa mendatang. Selain para pengembang, sector swasta yang perlu diperhitungkan peranannya dalam penataan ruang Kabupaten Mesuji adalah para investor dibidang industri dan perdagangan, para pelaku usaha pada sektor UMKM dan koperasi, LSM dan lain-lain.
- d. Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok/organisasi dalam kiprahnya dibidang ekonomi, sosial dan kemasyarakatan yang keikutsertaanya dalam proses penataan ruang dijamin oleh undang-undang juga akan berpengaruh besar dalam penataan ruang Kabupaten Mesuji. Dalam UU No.26 tahun 2007 pasal 65 dijelaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan, antara lain, melalui :
 - 1). Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang
 - 2). Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - 3). Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Dengan jaminan undang-undang dan peraturan daerah, masyarakat yang berhimpun dalam organisasi kemasyarakatan dan sosial politik serta lembaga-lembaga pendidikan akan sangat menentukan arah perkembangan dan wujud struktur ruang dan pola ruang Kabupaten Mesuji

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dan rencana sistem kota Kabupaten Mesuji dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW.

Secara lokalitas, selain KTM Mesuji, terdapat beberapa kawasan yang potensial dapat diusulkan sebagai kawasan strategis kabupaten (lokal), yaitu :

- 1. Kawasan Tepian Sungai Wiralaga (*Riversidecity*); pada kawasan ini sudah terdapat perkebunan sawit modern, dermaga dan diarahkan sebagai kota bahari.
- 2. Kawasan Minapolitan Rawajitu Utara, pada kawasan ini terdapat kawasan dengan kegiatan perikanan/minapolitan, sebagai pusat perdagangan serta terdapat dermaga.

3. Kawasan Konservasi Simpang Pematang, pada kawasan ini terdapat hutan kawasan industri dan juga merupakan kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan konservasi.

Untuk menetapkan kawasan-kawasan strategis yang sudah diidentifikasi di atas ada baiknya untuk mencermati kawasan tersebut dari sisi kriteria kawasan strategis yang sudah ditetapkan.

Kawasan strategis kabupaten dapat diusulkan kawasan berikut :

1. Kawasan KTM Mesuji yang berada pada Mesuji Timur dengan Kegiatan penunjang minapolitan dan Agropolitan, Kota Agropolitan, Wisata Agro, Pertanian lahan pangan sebagai lumbung padi dan hortikultura, serta perdagangan.
2. Kawasan Tepian Sungai Wiralaga (*Riversidecity*) dengan kegiatan yang terdiri dari perikanan, pusat perdagangan jasa dan pelayanan publik, industri pengolahan hasil serta perkebunan.
3. Kawasan Minapolitan Rawajitu Utara sebagai kegiatan minapolitan serta pusat perdagangan dan jasa.

2.4.5. Sarana dan Prasarana Umum

Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek kemantapan adalah merupakan kinerja gabungan dari aspek kondisi dan aspek pemanfaatan/kapasitas. Kinerja jaringan jalan dinyatakan sebagai Mantap Sempurna, Mantap Marginal dan Tidak Mantap, dimana hal tersebut lebih merupakan definisi secara kualitatif. Untuk keperluan teknis operasional diperlukan suatu definisi atau batasan/kriteria teknis (*“engineering criteria”*) yang lebih jelas dan bersifat kuantitatif.

Panjang jalan negara adalah 41,07 km dalam kondisi sedang 38,07 km dan rusak sepanjang 5,0 km. Panjang jalan provinsi 76,33 km dalam kondisi rusak berat, sedangkan panjang jalan kabupaten 379,2 km dalam kondisi baik 115,4 km, rusak 10 km, dan rusak berat sepanjang 250,7 km.

Dari keseluruhan jaringan jalan di Kabupaten Mesuji, panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah 115,4 km (19,28%), rusak 15,6 km (2,61%) dan rusak berat 427,03 km (71,34%).

Pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapanya.

Luas keseluruhan irigasi di Kabupaten Mesuji 3.735 ha, yang dibagi kedalam sebelas daerah irigasi. Rasio jaringan irigasi 11,463 dari luas lahan budidaya dan panjang jaringan irigasi yang ada.

Didalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Dalam hal ini efisiensi teknis diukur dari tiga indikator yaitu Pasok Irigasi per Area (PIA), Pasok Irigasi Relatif (PIR) dan Pasok Air Relatif (PAR). Sedangkan efektivitas ditunjukkan oleh indeks luas areal (IA).

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi berupa fasilitas air bersih, pembuangan limbah rumah tangga.

Syarat-syarat air minum menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya *Escherichia coli*) atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini.

Pemakaian air bersih merupakan kebutuhan pokok yang harus dikonsumsi penduduk secara rutin guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Baik buruknya pelayanan air bersih/minum akan sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku air untuk pengolahan lebih lanjut. Sumber air bersih/minum yang digunakan oleh penduduk di Kabupaten Mesuji sebagian besar merupakan sumur buatan penduduk. Kualitas air umumnya masih rendah karena ada bagian-bagian tertentu yang berupa air payau. Sebagian penduduk lain menampung air hujan dengan peralatan penampungan sendiri dan sebagian besar juga memanfaatkan air di sungai.

Beberapa desa di wilayah Kabupaten Mesuji yang dapat menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih karena tidak dipengaruhi air payau adalah desa Tanjung Menang dan Margojadi di Kecamatan Mesuji Timur dan desa Sidomulyo di Kecamatan Mesuji. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri dan kegiatan lainnya diperlukan sarana pengolahan air bersih/minum untuk wilayah perencanaan dan

sekitarnya. Guna meningkatkan persediaan air bersih/minum di wilayah Kabupaten Mesuji dimsa mendatang sangat diperlukan sistem jaringan air bersih/minum dari PDAM. Berdasar pada data BPS menyatakan bahwa sebanyak 60,34 % penduduk menggunakan air minum dari sumber air sumur terlindung maupun tak terlindung, dan terdapat 31,15 % masih menggunakan air sungai/air hujan.

Jenis limbah yang dihasilkan di kabupaten Mesuji berupa limbah rumah tangga dan limbah industri hasil pengolahan. Untuk limbah rumah tangga yang terdiri dari larutan maupun tersuspensi. Dalam usaha penyehatan lingkungan pembangunan sarana pembuangan akhir limbah secara sehat merupakan kebutuhan yang sangat penting. Karena itu seluruh limbah harus menggunakan saluran tertutup baik berupa pipa yang ditanam didalam tanah ataupun dengan sptictank. Dengan demikian melihat kondisi fisik yang porositasnya tinggi maka dapat menggunakan sistem perorangan /individual atau komunal yaitu dengan septictank. Selain itu masyarakat melakukan pembuangannya dengan WC pribadi maupun WC umum atau MCK umum yang ada disekitar kecamatan Mesuji. Pembuangan limbah dengan septictank ini secara ekonomis lebih ringan dibandingkan dengan sistem jaringan, selain itu sistem ini juga lebih sederhana.

Sampai dengan tahun 2010 belum tersedia pembuangan limbah domestic ataupun non domestik diwilayah kabupaten Mesuji berbentuk jaringan atau perpipaian. Penduduk umumnya menggunakan sptictank atau langsung membuang ke badan sungai-sungai disekitar pemukiman.

Berdasarkan data persentase rumah tangga menurut jarak sumber air minum ke tempat penampungan tinja menunjukkan 87,02 % lebih dari 10m dan persentase rumah tangga menurut fasilitas tempat pembuangan air besar di Kabupaten Mesuji sebanyak 73,15% milik sendiri.

Seluruh drainase pada dasarnya berfungsi untuk memindahkan air hujan secepat mungkin dari suatu daerah ke badan air atau penerima. Seluruh pembuangan drainase permanen baru tersebar disekitar wilayah perencanaan, yaitu pada sekitar jalur jalan. Pembangunan sarana drainase pengembangannya terutama diarahkan pada kawasan pemukimam dan industri. Pengembangan jaringan drainase ditiap-tiap wilayah dengan memanfaatkan saluran primer (anak sungai/sungai) sebagai saluran limpasan terakhir. Prioritas pembangunan sistem drainase perkotaan dan perdesaan ini mengingat wilayah Kabupaten Mesuji merupakan pusat segala macam kegiatan baik

pemerintahan, perdagangan, dan jasa industri dan sebagainya. Selain itu penduduk terkonsentrasi di wilayah tersebut. Hal ini, berdampak tertutupnya permukaan tanah yang menghasilkan air limpasan hujan yang banyak sehingga perlu tempat penampungan (berupa saluran) ketempat pembuangan akhir.

Secara umum, drainase di wilayah Kabupaten Mesuji mengikuti pola jaringan jalan eksisting dan memanfaatkan sungai sebagai saluran primer. Karakteristik kawasan yang datar dan berupa rawa sejak awal telah diinterfensi melalui pembangunan saluran-saluran irigasi rawa terutama dikawasan pemukiman transmigrasi untuk menghindari terjadinya genangan. Saluran tersebut secara berjenjang terdiri dari saluran primer, saluran sekunder yang dilengkapi pintu air, saluran tersier, dan pada sisi kanan dan kiri jalan terdapat saluran gendong.

Saluran irigasi rawa primer digunakan pula untuk keperluan transportasi air dan saluran sekunder digunakan untuk pengairan sawah. Hanya saja karena posisinya di bawah petak sawah diperlukan mesin untuk mengalirkan air dari saluran sekunder ke lahan sawah. Sementara saluran gendong yang terletak di kanan dan kiri jalan sayangnya sering dijadikan tempat pembuangan limbah dan sawah, terutama disekitar pasar Tanjung Mas Makmur.

Sampah secara sederhana diartikan sebagai sampah organik maupun anorganik yang dibuang oleh masyarakat dari berbagai lokasi tersebut. Sumber sampah umumnya berasal dari perumahan dan pasar. Sampah menjadi masalah penting untuk perkotaan dan perdesaan yang padat penduduknya. Kondisi pada perkotaan berbeda dengan kondisi perdesaan yang umumnya tidak mengalami permasalahan dalam penanganan persampahan. Ketersediaan lahan di perdesaan masih cukup luas mempermudah masyarakat desa mengelola sendiri persampahan yang ditimbulkannya. Tempat sampah yang memadai menjadi hal yang sangat langka pada kawasan yang padat penduduknya.

Penanganan sampah di wilayah Kabupaten Mesuji masih dilakukan secara individual dan belum dilayani oleh pengelolaan persampahan dari dinas terkait. Umumnya penduduk mengelola sampah dengan cara langsung membakar, menimbun, dan bahkan terdapat beberapa area dimana ditemui pembuangan sampah ke saluran irigasi rawa. Secara khusus diperlukan TPS mengingat pada wilayah ini terdapat berbagai kegiatan yang menghasilkan limbah padat (sampah) yang perlu dikelola secara baik untuk menciptakan kawasan perkotaan yang memiliki daya tarik untuk berinvestasi.

Berdasarkan informasi dari Pemerintah Kabupaten Mesuji, telah disiapkan lahan untuk pengembangan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan pengolahan limbah di desa Pangkal Mas Mulia. TPA ini akan digunakan untuk layanan persampahan dikecamatan Mesuji dan Mesuji Timur.

Sarana peribadatan di Kabupaten Mesuji sangat penting untuk masyarakat/penduduk dalam melaksanakan keagamaan dan kerohanian. Penduduk diwilayah Kabupaten Mesuji sangat heterogen, maka sarana peribadatan yang ada terdiri Masjid, Mushola, Rumah Gereja, Pura dan Wihara.

Jumlah pemeluk agama Islam sebanyak 186.080 jiwa, Kristen/Protestan 3.276 jiwa, Hindu 3.730 jiwa dan Budha sebanyak 309 jiwa. Sarana peribadatan di Kabupaten Mesuji Masjid dan Mushola sebanyak 1.050 buah, gereja 56 buah, pure 21 buah, dan vihara sebanyak 4 buah. Rasio dari masing-masing rumah ibadah yaitu: Masjid/Mushola 0,006; gereja 0,017; pure 0,006; dan vihara 0,013.

BAB 3

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

3.1.1. PEMBANGUNAN EKONOMI

a. Pengangguran dan kemiskinan

Pengangguraan di Kabupaten Mesuji menunjukkan tingkat yang relatif rendah sebesar 6,64 dan namun angka kemiskinan yang ada masih tinggi hal ini ditunjukkan dengan persentase penerima raskin 41,45 persen, jumlah keluarga fakir miskin 11,76 dan keluarga prasejahtera relatif tinggi 45,81 persen

b. Lembaga keuangan perbankan dan non perbankan relatif kurang untuk mengembangkan sektor riil terutama wilayah jangkauan yang masih terbatas di Kabupaten Mesuji.

c. Pola investasi untuk PMA dan PMDN belum nyata terlihat mampu menggerakkan perekonomian lokal masyarakat daerah hal ini ditunjukkan dengan jenis investasi PMA dan PMDN yang terkonsentrasi pada sektor perkebunan dan olahan awal hasil perkebunan belum kepada capaian produk industri hilir.

3.1.2. PEMBANGUNAN SOSIAL

Masih kurangnya kemampuan pemerintah daerah Mesuji dalam mendukung pertumbuhan pembangunan sosial ditunjukkan dengan tingkat pertumbuhan sarana olahraga, gedung kesenian, dan sarana pelayanan-pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan) yang amat terbatas.

Salah satu fungsi pemerintah adalah menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat. Pelayanan pendidikan di Kabupaten Mesuji untuk tingkat pendidikan dasar cukup memadai namun untuk tingkat pendidikan menengah dan tinggi belum dalam kondisi baik karena ketiadaan lembaga pendidikan tinggi. Sedangkan pelayanan kesehatan belum dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Hal ini harus didukung dengan ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai. Berdasarkan data tahun 2009, rasio ketersediaan puskesmas di Kabupaten Mesuji sudah baik (4,5 per 100.000 penduduk) diatas standar nasional sebesar 3,3 per 100.000 penduduk. Selain puskesmas, ketersediaan tenaga medis di Kabupaten Mesuji juga sudah baik (199 per 100.000 penduduk).

Namun untuk rasio ketersediaan dokter, dokter spesialis, dan ahli kesehatan masyarakat di Kabupaten Mesuji masih sangat kurang. Kondisi saat ini ketersediaan rumah sakit daerah belum ada.

3.1.3. PEMBANGUNAN PRASARANA WILAYAH

- a. Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah. Infrastruktur Jalan merupakan prasarana transportasi untuk mobilitas penduduk maupun barang yang keluar maupun masuk ke Kabupaten Mesuji. Sebagian besar kondisi jalan di Kabupaten Mesuji rusak berat. Sarana terminal yang belum tertata, secara sistem pengaturan trayek dan penanganan klasifikasi jenis moda angkutan yang digunakan dalam melayani pengguna jasa transportasi darat terbatas.
- b. Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. Kemampuan pemerintah daerah mengelola jalan untuk tetap dalam kondisi baik secara umum belum mampu ditangani dengan baik. sebagian besar (67,5%) atau sepanjang 385,2 km jalan di Kabupaten Mesuji dalam kondisi rusak berat. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Fungsi jalan sebagai prasarana transportasi sangat vital bagi arus lalu lintas orang dan barang di Kabupaten Mesuji. Kondisi jalan yang rusak mengakibatkan terhambatnya arus keluar masuk orang dan barang karena waktu tempuh yang menjadi lama sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- c. Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik. Masyarakat Kabupaten Mesuji sampai saat ini masih mengandalkan tenaga diesel sendiri untuk kebutuhan penerangan. Pelayanan jaringan listrik oleh PLN di wilayah Kabupaten Mesuji saat ini belum menjangkau sebagian besar daerah permukiman perdesaan. Banyaknya rumah tangga yang belum menggunakan listrik disebabkan karena pelayanan listrik dari PLN terbatas di kabupaten Mesuji dan sekitarnya, Bahkan sebagian rumah tangga menggunakan listrik yang bersumber dari PLTD yang berlokasi di Nipah Kuning. Sementara penduduk yang tidak dilayani oleh PLTD harus menggunakan mesin diesel/genset pribadi atau secara komunal, yang tentu saja tidak semua warga mampu untuk menyediakan kebutuhan listrik ini. Listrik non PLN berasal dari mesin diesel/genset yang umumnya dikelola secara komunal.

- d. Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum.
Kondisi wilayah yang sebagian besar adalah kawasan rawa menyebabkan kualitas air di Kabupaten Mesuji relatif masih rendah untuk kebutuhan air minum dan kebutuhan lainnya. Perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas air minum dan air bersih di Kabupaten Mesuji melalui mekanisme pengelolaan air bersih yang lebih baik.
- e. Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur. Berkurangnya kemampuan pemerintah dalam pembiayaan pelayanan infrastruktur perlu dilakukan terobosan kebijakan dalam menggandeng PMA dan PMDN untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pembiayaan pelayanan infrastruktur daerah.

3.1.4. PEMBANGUNAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

- a. Peningkatan kualitas permukiman (kawasan rawan bencana, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah).
- b. Peningkatan dan pengadaan ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan.
- c. Alih fungsi lahan pertanian keperuntukan tanaman padi produktif menjadi lahan permukiman atau perkebunan secara signifikan.
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada kebutuhan lahan untuk pembangunan.
- e. Penurunan luas kawasan Hutan dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis.
- f. Kejadian bencana alam, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung.

3.1.5. PERMASALAHAN KHUSUS

- a. Kurangnya daya saing investasi daerah mesuji, saat ini investasi PMDN hanya terfokus pada bidang perkebunan saja dengan penguasaan ribuan hektar lahan perkebunan yang amat kecil tingkat pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat secara langsung. Sehingga perlu kebijakan daerah yang lebih baik dalam hal investasi daerah.
- b. Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. adanya kebijakan strategi penanganan kawasan tertinggal dan kemiskinan yang berkelanjutan.

- c. Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat

Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), Kabupaten Mesuji belum memiliki pemimpin daerah yang berasal dari hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Hal ini menjadikan legitimasi pemimpin daerah rendah karena bukan dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini perlu segera diatasi dengan penyelenggaraan Pemilukada untuk memperoleh pemimpin daerah yang *legitimated* dan mendapat dukungan penuh rakyat Mesuji. Hal ini penting karena kepala daerah perlu mendapat dukungan penuh rakyat untuk dapat menjalankan program pembangunan. Selain itu, jangka waktu perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Mesuji juga hanya tinggal 3 (tiga) periode kepala daerah atau 3 (tiga) periode RPJMD. Kondisi ini menyebabkan Pemerintah kabupaten Mesuji perlu melakukan terobosan strategi dan kebijakan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan.

- d. Rendahnya proses pembangunan yang dilakukan karena keterbatasan pendanaan anggaran pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan dengan pelibatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- e. Kerawanan kawasan register 45 dimana penguasaan lahan hutan produksi yang berada jalur jalan lintas timur, berdekatan pemukiman warga dan kawasan pusat perekonomian Kecamatan Simpang Pematang. Dibutuhkan kebijakan baru oleh pemerintah pusat dan daerah untuk pemanfaatan sebagian kecil kawasan register untuk mendukung visi pembangunan Kabupaten Mesuji.
- f. Ketersediaan data dan sistem informasi. Sebagaimana kondisi pada Daerah Otonomi Baru (DOB) pada umumnya, ketersediaan data dan sistem informasi di Kabupaten Mesuji belum memadai. Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai instansi yang berwenang menyediakan data belum berada di Kabupaten Mesuji masih di Kabupaten Induk Tulang Bawang. Data-data yang tersedia di SKPD masih terbatas, tidak *up to date*, dan sering terdapat perbedaan data antara satu sumber dengan sumber yang lain. Selain itu Kabupaten Mesuji juga belum memiliki sistem informasi sebagai suatu perangkat yang sangat mendukung untuk pengambilan kebijakan.

3.2. ISU STRATEGIS DAERAH

Dalam upaya untuk mencapai arah dan prioritas pembangunan nasional, dan Provinsi Lampung beberapa isu-strategis yang

menjadi agenda utama dalam pembangunan Kabupaten Mesuji terbagi dalam bidang ekonomi, isu bidang sosial budaya dan kependudukan, isu bidang infrastruktur, isu bidang sumberdaya alam dan lingkungan

3.2.1.ISU BIDANG EKONOMI

a. Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat melalui Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mendukung terciptanya penyelenggaraan program pembangunan ekonomi yang makin berkualitas, yaitu pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing, serta makin memacu terciptanya kreativitas dan inovasi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga akan mempercepat tercapainya tataran pembangunan ekonomi yang makin mandiri.

Pertumbuhan ekonomi lokal harus sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan SDM yang terdapat di Kabupaten Mesuji, sehingga penduduk Kabupaten Mesuji akan mampu berperan aktif dan tidak akan menjadi penonton di rumah sendiri. Pertumbuhan ekonomi lokal yang dimaksudkan juga harus memiliki karakteristik yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Artinya pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mesti bertumpu kepada perkonomian yang tumbuh dan berkembang secara nyata di tengah masyarakat, dan bukan bentuk perkonomian yang merupakan introduksi baru.

Karakteristik lain yang menjadi tantangan adalah bagaimana membangun perekonomian lokal yang mampu menghasilkan produk dengan nilai komparatif gain terhadap produk dari daerah lain, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi nilai kompetitif lokal.

b. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Penegakan Hukum

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional. Krisis ekonomi yang lalu tidak terlepas dari buruknya tata kelola pemerintahan, baik di sektor pemerintahan maupun swasta.

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Untuk itu, reformasi birokrasi akan dilaksanakan di seluruh kementerian/lembaga untuk selanjutnya diteruskan di pemerintah daerah. Selanjutnya dalam penyusunan perencanaan dan anggaran, akan

diterapkan sistem anggaran berbasis kinerja secara menyeluruh. Reformasi ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang positif khususnya dalam perbaikan kualitas pelayanan publik, efektivitas dan akuntabilitas kegiatan kementerian/ lembaga dan penanggulangan korupsi.

Terkait dengan kepastian usaha, salah satu persoalan yang dianggap kerap mengganggu masuknya investasi ke Indonesia adalah lemahnya kepastian hukum. Karenanya penegakan hukum akan membawa dampak yang positif bagi perbaikan iklim investasi yang pada gilirannya akan memberi dampak positif bagi perekonomian daerah.

c. Pembangunan partisipatif dan Berkeadilan

penguatan dimensi keadilan dan keikutsertaan akan dilakukan untuk setiap kegiatan atau program pembangunan. Misalnya, melalui Program Keluarga Harapan (PKH), bagi masyarakat sangat miskin akan diberikan bantuan tunai bersyarat dalam bentuk dukungan biaya pendidikan dan kesehatan.

d. Mempertahankan Ketahanan Pangan Kabupaten Mesuji

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi atau keadaan yang meliputi kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan pangan dengan jumlah, kualitas, waktu yang tepat, serta dengan harga terjangkau. Isu ketahanan pangan ini mempunyai arti sangat penting karena berkaitan secara langsung dengan hajat hidup masyarakat.

Kondisi ketahanan pangan akan terkait dengan produksi dan produktivitas bahan pangan. Sedangkan produksi dan produktivitas bahan pangan akan terkait dengan aspek iklim; pengelolaan sumber daya air; input sarana produksi (bibit, pupuk, pakan, peralatan); serta berbagai aspek lain yang terkait dengan aspek agribisnis. Perlu adanya jaminan bagi keberlangsungan swasembada pangan di Kabupaten Mesuji dengan demikian sudah saatnya untuk mempersiapkan regulasi mengenai lahan abadi pertanian. Kendala pada ekstensifikasi juga menyebabkan penyediaan input menjadi faktor kunci dalam pengembangan agribisnis. Dalam hal penyediaan input, selain diperlukan regulasi, maka juga diperlukan adanya koordinasi terus menerus pada semua *stake holder* terkait.

e. Pengembangan Agro Industri yang mengutamakan ekonomi kerakyatan

Sesuai dengan potensi dasar bahwa Kabupaten Mesuji adalah wilayah pengembangan agro industri. Hal ini dilakukan guna

mendukung perkuatan ketahanan pangan sekaligus merupakan pengembangan keunggulan potensi daerah. Komoditas yang dikembangkan dalam agro industri adalah beberapa komoditas yang merupakan unggulan daerah dan dapat dikembangkan lebih lanjut ke arah produk industri. Dengan demikian produk akhir yang dipasarkan berupa produk setengah jadi atau produk jadi. Selain itu, produk yang dihasilkan merupakan sebuah produk yang dapat berkembang menjadi *trade mark* Kabupaten Mesuji. Dengan demikian, baik secara langsung maupun tidak langsung produk yang dihasilkan mempunyai nilai komparatif terhadap produk dari luar daerah. Dalam pengembangan isu agro industri perlu diupayakan keseimbangan antara peningkatan produksi di satu sisi, namun pada sisi lain proses produksi masih mampu didukung oleh sumber daya alam yang tersedia. Artinya, proses produksi tersebut tidak justru menguras sumber daya alam. Konsep ini dikenal dengan konsep pertanian berkelanjutan.

f. Penciptaan Lapangan Kerja

Data komposisi penduduk yang disajikan memperlihatkan bahwa 54,41% merupakan angkatan kerja. Sedangkan angka pengangguran untuk angkatan kerja mencapai 6,64%. Pada sisi lain, data Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) mencapai 45,59%, sehingga beban penduduk usia produktif Kabupaten Mesuji cukup banyak. Data yang diungkapkan mempunyai arti bahwa penciptaan lapangan kerja menjadi isu penting yang harus dengan segera diatasi.

g. Optimalisasi SDA Bagi Kesejahteraan Masyarakat

Kabupaten Mesuji memiliki beberapa daerah yang mempunyai potensi tambang batu bara dan migas. Bahkan pada beberapa lokasi, tambang tersebut telah diteliti dan dieksploitasi. Berkaitan dengan hal ini, maka muncul Isu mengenai perlunya optimalisasi tambang batubara dan migas untuk membangkitkan energi listrik di Kabupaten Mesuji.

3.2.2.ISU BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEPENDUDUKAN

a. Penurunan Jumlah Penduduk Miskin dan Pengendalian Jumlah Penduduk

Penduduk miskin tersebut pada umumnya berada dan tinggal di daerah Desa Tertinggal (DT). Secara keseluruhan DT di Provinsi Lampung mencapai 765 desa. Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang multifaset dan multidimensi, sehingga penanganan kemiskinan tidak akan mungkin diselesaikan oleh satu pihak. Dengan demikian

sinergi dari semua *stake holder* merupakan kata kunci yang harus diterapkan pada semua lini.

Kemiskinan bukan saja berpengaruh secara langsung terhadap kualitas kehidupan penduduk, namun juga memberikan implikasi ikutan yang merupakan side effect dari kondisi kemiskinan yang sedang berlangsung. Side effect tersebut antara lain berupa gangguan keamanan, peningkatan prostitusi, peningkatan jumlah tenaga kerja anak dan jumlah anak jalanan, peningkatan angka drop out sekolah, kerusakan lingkungan hidup, serta berbagai masalah ikutan, baik secara sosial, hukum, maupun secara politis. Sebagai sebuah masalah multifaset, maka pendekatan masalah kemiskinan harus dilakukan dari semua sektor dan semua lini, baik dari aspek ekonomi aspek politik, maupun hukum, serta dilakukan secara serempak dan berkesinambungan.

Pada masa mendatang, berbagai program penurunan jumlah penduduk miskin harus tetap dilanjutkan. Peningkatan perlu dilakukan, terutama dari aspek *stake holder* yang terlibat, sektor dan aspek yang ditangani, maupun kualitas dan kuantitas program yang akan diimplementasikan. Semakin besar jumlah penduduk, maka akan semakin besar juga beban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji, sehingga semua persoalan yang berkembang di masyarakat pada dasarnya terjadi karena adanya peningkatan jumlah penduduk.

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan, maka perkembangan jumlah penduduk akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Dengan demikian pengendalian jumlah penduduk menjadi faktor penting dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

b. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Sumber daya manusia (SDM) dalam konteks pembangunan merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Dengan demikian Isu peningkatan SDM melalui peningkatan pendidikan mempunyai peran sentral dalam pembangunan. Peran SDM ini semakin jelas ketika kualitas SDM menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam program pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan investasi, serta berbagai program lain. Berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM, maka pendidikan sebagai dasar bagi pengembangan SDM menjadi faktor kunci dalam pembangunan.

Masalah yang muncul dari bidang pendidikan adalah sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata sehingga kualitas pendidikan di Kabupaten Mesuji menjadi tidak merata. Sarana dan prasarana tersebut selain berupa fisik, seperti: bangunan sekolah, buku, dan laboratorium; juga berupa non fisik, seperti: tenaga kependidikan, kurikulum, dan teknik kependidikan.

Ketidakmerataan kualitas pendidikan tersebut terutama terjadi pada daerah terpencil dan daerah yang merupakan kantong kemiskinan. Pada sisi lain, tenaga kependidikan yang merupakan lulusan perguruan tinggi sebagian besar menumpuk di daerah perkotaan.

Masalah lain adalah bagaimana menambahkan kurikulum yang mampu memberikan *"life skill"* dan materi pendidikan yang mampu mengadopsi *"local wisdom"* kepada peserta didik. Diharapkan dengan adopsi ini maka lulusan pendidikan di Kabupaten Mesuji akan mampu hidup mandiri dengan mempergunakan semua kelebihan dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Mesuji sendiri.

c. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Isu utama pada bidang kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang terjangkau dan cepat, terutama kepada masyarakat miskin. Selain itu juga bagaimana jangkauan pelayanan kesehatan tersebut dapat merata ke seluruh pelosok dan daerah terpencil. Dengan demikian perlu dikembangkan sarana dan prasarana kesehatan di masyarakat. Sarana dan prasarana tersebut minimal berupa Puskesmas Pembantu; adanya Mantri Kesehatan yang ditempatkan di perdesaan; ataupun peningkatan operasionalisasi Puskesmas Keliling.

d. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikatornya. Meskipun Kabupaten Mesuji memiliki tingkat PDRB tertinggi nomor 2 di Provinsi Lampung, namun IPM-nya hanya 67,49 dan merupakan yang terendah di antara kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Ini mengindikasikan sebenarnya penyumbang terbesar produktivitas daerah yang berpengaruh pada PDRB bukanlah masyarakat melainkan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Mesuji. Kebijakan peningkatan IPM juga diseleraskan dengan tujuan yang tercantum dalam *Millenium Development Goals* (MDG's) yaitu:

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan;
 2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua
 3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
 4. Menurunkan angka kematian anak
 5. Peningkatan kesehatan ibu
 6. Mengendalikan HIV AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya;
 7. Menjamin kelestarian lingkungan hidup
 8. Mengembangkan kemitraan untuk pembangunan
- e. Peningkatan Budaya Daerah dan Pariwisata

Salah satu isu global penting saat ini adalah Revolusi 3T (Teknologi, Telekomunikasi, Transportasi). Isu ini mengakibatkan adanya mobilitas manusia yang sangat cepat dan tidak terbatas. Salah satu akibat positif yang terjadi adalah berkembangnya industri pariwisata di seluruh dunia. Berkaitan dengan Isu global yang telah mengakibatkan berkembangnya industri pariwisata sehingga daerah dapat memperoleh benefit guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Peningkatan peran dalam pengembangan industri pariwisata ini dimungkinkan karena secara alami Kabupaten Mesuji memiliki SDA yang layak untuk dikembangkan sebagai sebuah industri pariwisata. Sementara itu, pengembangan pariwisata tidak dapat dilepaskan dari pengembangan budaya daerah.

3.2.3.ISU BUDANG INFRASTRUKTUR

- a. Pengembangan dan peningkatan Infrastruktur

Isu infrastruktur seperti diketahui mempunyai peran sangat penting dalam proses pengembangan ekonomi pada suatu wilayah. Hal ini dimungkinkan karena infrastruktur merupakan pendorong, pendukung, sekaligus pemacu bagi tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi.

Peran infrastruktur sebagai pendorong perkembangan ekonomi adalah pada saat suatu wilayah belum berkembang atau terisolasi. Sementara peran pendukung, dimiliki pada saat suatu wilayah yang telah terdapat kegiatan ekonomi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Sedangkan bila ekonomi pada suatu wilayah telah berkembang baik, maka pembangunan infrastruktur akan berperan untuk memacu pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Aspek penting infrastruktur tidak dapat dipahami secara sempit, yakni hanya meliputi: jalan, jembatan, pelabuhan, dan sarana pengairan, namun infrastruktur mesti dipahami dalam konteks lebih luas. Dengan demikian termasuk dalam cakupan infrastruktur ini akan meliputi: pengembangan teknologi informasi, pembangunan gedung, pengadaan sarana transportasi, serta pembangunan berbagai sarana lain, baik berupa fisik maupun non fisik, yang berperan dalam mendukung berbagai kegiatan ekonomi.

Tantangan utama dalam implementasi pengembangan infrastruktur adalah format pembangunan infrastruktur mampu secara mantap dan konsisten mendukung perkembangan ekonomi lokal secara keseluruhan. Tantangan lain adalah bagaimana pembangunan infrastruktur tersebut dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, baik dalam rangka pengembangan ekonomi maupun sosial. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur akan mampu meningkatkan kapasitas dan ekonomi masyarakat.

Upaya pembangunan infrastruktur harus mempunyai kerangka berpikir yang bersifat long term, berkesinambungan, dan mempunyai visi yang jauh ke masa depan; sehingga tidak akan terjadi pembangunan infrastruktur yang tambal sulam dan tidak well program. Dengan demikian sangat dimungkinkan untuk mulai merancang dan membangun infrastruktur yang bersifat fungsional sekaligus monumental.

Sementara itu, seperti diketahui anggaran Pemda Kabupaten Mesuji mempunyai berbagai keterbatasan. Kondisi ini akan memunculkan tantangan dalam hal pendanaan program pembangunan infrastruktur. Sehingga, perlu dikembangkan alternatif pendanaan, seperti : merancang skala prioritas; merancang kerja sama dengan pihak di luar Pemda untuk membiayai pembangunan infrastruktur; atau merancang kombinasi kedua desain secara akurat dan konsisten.

b. Antisipasi dan Mitigasi Bencana

Kabupaten Mesuji secara geografis berada pada daerah aliran sungai sehingga rawan bencana alam terutama banjir, sehingga isu mitigasi bencana menjadi suatu keniscayaan. Kondisi ini mengharuskan Pemda Mesuji untuk mampu secara komprehensif mempersiapkan diri guna mengantisipasi semua aspek yang terkait dengan bencana alam. Jadi, meski bencana alam tidak dapat diramalkan kapan akan terjadi, namun paling tidak dapat diminimalkan resiko dan akibat

susunan yang terjadi pasca bencana. Dengan demikian sangat diperlukan adanya suatu konsep mitigasi bencana yang jelas.

Mitigasi bencana harus meliputi suatu konsep yang menyeluruh, komprehensif, dan mendasar; serta akan menyangkut aspek hard ware maupun soft ware dalam penanganan bencana. Aspek hard ware akan terkait dengan penyediaan semua peralatan, fasilitas, serta sarana dan prasarana pendukung dalam penanganan bencana, termasuk aspek pendanaan. Sedangkan aspek soft ware akan terkait dengan konsep, strategi, manajemen, dan kemampuan SDM dalam penanganan bencana. Konsep mitigasi bencana juga harus melibatkan partisipasi masyarakat. Peran serta masyarakat sangat diperlukan mengingat masyarakat merupakan komponen yang terlibat secara langsung sebagai obyek dan sekaligus subyek dalam mitigasi bencana.

Mitigasi bencana tidak saja terkait dengan kejadian bencana alam, namun juga menyangkut semua bencana yang berpengaruh dan berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Dengan demikian, termasuk dalam konsep ini adalah bagaimana mengantisipasi dan menangani bencana yang disebabkan oleh kejadian berbagai penyakit menular dan berdampak luas, seperti penyakit HIV/AIDS dan Flu Burung.

3.2.4.ISU BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

a. Konservasi Lingkungan dan SDA

Isu kerusakan lingkungan dan SDA telah menjadi topik yang berkembang selama dekade terakhir. Isu ini menjadi sangat penting mengingat lingkungan dan SDA merupakan daya dukung utama bagi keberlangsungan kehidupan manusia secara normal. Isu kerusakan lingkungan dan SDA juga telah memunculkan permasalahan lanjutan berupa: pengamanan dan pelestarian hutan, peningkatan lahan kritis, pencemaran, bencana banjir, ataupun kekeringan.

Isu kerusakan lingkungan dan SDA tidak hanya menyangkut kerusakan hutan semata, namun juga melibatkan kerusakan ekosistem secara lebih luas. Kerusakan lingkungan tidak terbatas pada wilayah maupun matra, sehingga kerusakan lingkungan dapat terjadi di berbagai lini kehidupan. Kerusakan lingkungan akan menyebabkan terjadinya ketidaknormalan kehidupan manusia secara umum. Hal ini antara lain terlihat dari terjadinya penurunan produktivitas dalam bidang pertanian dalam arti luas, sehingga akan mempengaruhi ketersediaan pangan. Penurunan produktivitas juga dapat terjadi pada manusia sendiri sebagai

akibat adanya penurunan tingkat kenyamanan lingkungan tempat manusia hidup.

b. Krisis Air dan Penurunan Kualitas Air Minum dan Air Bersih

Isu krisis air bermula dari kondisi hutan sudah sangat memprihatinkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Penurunan luas kawasan hutan cukup cepat dan signifikan. Tingkat kerusakan cukup berat, yakni mencapai $\pm 65\%$, sehingga pada saat ini luas kawasan hutan di Provinsi Lampung hanya tinggal $\pm 30\%$ dari luas daratan Provinsi Lampung.

Fungsi hutan secara ekologis yang sangat vital adalah sebagai catchment area, yakni sebagai daerah resapan air. Sementara itu, peningkatan lahan kritis akan menyebabkan daya ikat tanah terhadap aliran air akan semakin rendah. Dengan demikian, kerusakan hutan telah memunculkan isu krisis air. Krisis air ini menjadi isu penting yang harus ditangani, mengingat perekonomian di Kabupaten Mesuji bertumpu pada pertanian dan agribisnis. Ancaman Isu krisis air ini secara langsung akan sangat mempengaruhi keberlangsungan kegiatan pertanian dan agribisnis di Kabupaten Mesuji. Hal ini berarti krisis air telah menjadi isu yang berpengaruh besar terhadap kehidupan penduduk.

c. Antisipasi Pemanasan Global

Pemanasan global telah berkembang menjadi isu dunia. Isu ini berkembang sedemikian cepat dan menyebar ke seluruh dunia karena pengaruhnya yang sedemikian besar terhadap kehidupan manusia. Pemanasan global telah memungkinkan terjadinya perubahan iklim global, dan perubahan iklim ini akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan pertanian dan agribisnis secara keseluruhan.

Dengan demikian, mau tidak mau, isu Pemanasan Global juga telah berkembang menjadi isu lokal. Pada sisi lain, isu Global Warming juga mengharuskan pengelolaan sumber daya air dengan cermat dan bijak. Hal ini perlu dilakukan mengingat Global Warming memungkinkan terjadinya banjir dan kekeringan dalam kondisi kontras, ekstrim, dan tidak terprediksi.

d. Pengembangan Energi Terbarukan

Bahan bakar karbon mempunyai batas jumlah yang dapat ditambang, sehingga hanya soal waktu bahan bakar karbon tersebut menjadi habis. Fakta ini memunculkan isu mengenai pentingnya pengembangan berbagai sumber energi alternatif dan terbarukan. Selain itu, menjadi sangat penting untuk

melakukan penghematan penggunaan bahan bakar yang bersumber dari karbon. Penghematan energi dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan bahan bakar minyak (BBM) dengan gas. Meskipun demikian, konsep ini masih terkendala dengan mekanisme dan penyediaan sarana prasarana pengalihan bahan bakar.

Masalah dalam isu pengembangan energi alternatif adalah bagaimana mengupayakan penyediaan bio fuel sebagai substitusi untuk bahan bakar karbon secara efisien dan murah. Meskipun Kabupaten Mesuji menyediakan bahan dasar bagi pengembangan bio fuel seperti singkong, tebu, dan sawit dalam jumlah melimpah, namun masih terdapat masalah berkaitan dengan efisiensi ekonomis. Selain itu masih diperlukan adanya investor untuk dapat menanamkan modalnya bagi pengembangan bio fuel di Kabupaten Mesuji.

BAB 4

VISI DAN MISI DAERAH

4.1. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi RPJPD Kabupaten Mesuji 2005-2025 adalah:

**MESUJI TUMBUH, BERKEMBANG, MAJU DAN BERDAYA
SAING MENJADI BUMI AGRIBISNIS 2025**

4.1.1.TUMBUH

Tumbuh memiliki makna proses dan kondisi. Menurut ilmu biologi, tumbuh berarti individu/organisma yang semakin membesar. Hal ini dapat dilihat dari semakin besar PDRB Kabupaten Mesuji, meningkatnya IPM, adanya ekspansi ekonomi dalam pelaku yang sama, digambarkan oleh meningkatnya economic of scale dan adanya intensifikasi dimasing-masing bidang usaha.

Sebagai suatu proses, tumbuh adalah inisiasi atau dimulainya upaya untuk menata kondisi Mesuji menjadi lebih baik.

Dalam kaidah psikologi, tumbuh berarti munculnya motivasi dan semangat baru untuk membangun. Motivasi dan semangat baru ini muncul karena cara pandang (*mind set*) yang berubah menjadi lebih baik, lebih optimis dan lebih kreatif.

Secara ekonomikal, tumbuh bermakna dimulainya berbagai investasi baru baik oleh pelaku ekonomi lama dan maupun pelaku ekonomi baru. Kekuatan ekonomi baru ditumbuhkan oleh koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Keterkaitan usaha juga harus ditumbuhkan agar tercipta sinergitas sebagai upaya penciptaan nilai tambah dengan optimal.

4.1.2.BERKEMBANG

Secara biologi, perkembangan adalah proses makhluk hidup yang sedang menuju ke masa dewasa. Perkembangan itu tidak hanya dapat diukur atau dinyatakan dengan bilangan saja, tetapi perkembangan juga bisa dinyatakan melalui suatu perubahan bentuk dan tingkat masa kedewasaan. Kabupaten Mesuji yang berkembang, bermakna meningkatnya kapasitas untuk bersaing. Meretasnya berbagai kemampuan anggota masyarakat dalam membangun diri sendiri, keluarga, dan komunitas atau masyarakat. Semakin baiknya kontrol masyarakat pada

pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, yang disertai oleh partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi semakin besar.

4.1.3.MAJU

Daerah yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik; tingkat pendapatan masyarakatnya tinggi. Keterpaduan antarsektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor-sektor jasa; serta pemanfaatan sumber alam. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang tinggi.

Daerah yang maju juga telah memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap. Lembaga politik dan kemasyarakatan telah berfungsi berdasarkan aturan dasar. Daerah yang maju pada umumnya menganut sistem demokrasi, yang sesuai dengan budaya dan latar belakang sejarahnya. Daerah yang maju adalah Daerah yang hak-hak warganya, keamanannya, dan ketenteramannya terjamin dalam kehidupannya. Daerah yang maju juga harus didukung dengan infrastruktur yang maju.

4.1.4.BERDAYA SAING

Daya saing adalah kemampuan dari daerah untuk menunjukkan keunggulan dalam hal tertentu, dengan cara memperlihatkan situasi dan kondisi yang paling menguntungkan, hasil kerja yang lebih baik, lebih cepat atau lebih bermakna dibandingkan dengan daerah lainnya.

Kemampuan daerah, masyarakat, dan pemerintah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan terbuka pada persaingan domestik dan internasional serta kemampuan untuk lebih mengoptimalkan lagi sumber daya alam agar lebih tergali dan berpotensi, sehingga pengetahuan dan keunggulan komparatif dapat digunakan para pengambil kebijakan untuk mendorong perubahan struktur perekonomian daerah ke arah sektor yang memiliki keunggulan kompetitif.

Tinggi rendahnya daya saing daerah tergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ruang lingkup daya saing setidaknya meliputi: 1) perekonomian daerah, 2) keterbukaan, 3) sistem keuangan, 4) infrastruktur 5) ilmu pengetahuan dan

teknologi, 6) sumber daya alam, 7) kelembagaan, 8) peraturan perundangan, 9) Manajemen Sumber Daya Aparatur, dan 10) Masyarakat.

4.1.5.BUMI AGRIBISNIS

Bumi Agribisnis adalah sebuah wilayah, yang terdiri dari berbagai unsur batuan, air dan mineral dimana tumbuh dan berkembang berbagai kehidupan hayati di atasnya yang kemudian dimanfaatkan dalam suatu kegiatan agribisnis. Dimana agribisnis memiliki makna setiap usaha yang berkaitan dengan kegiatan produksi pertanian, yang meliputi pengusahaan input pertanian dan atau pengusahaan produksi pertanian atau pun juga pengusahaan pengelolaan hasil pertanian.

Agribisnis merupakan cara pandang ekonomi bagi kegiatan dalam bidang pertanian. Agribisnis mempelajari strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Secara luas, agribisnis berarti "bisnis berbasis sumber daya alam".

Objek agribisnis dapat berupa tumbuhan, hewan, ataupun organisme lainnya. Kegiatan budidaya termasuk dalam bagian hulu agribisnis. Apabila produk budidaya (hasil panen) dimanfaatkan oleh pengelola sendiri, kegiatan ini disebut pertanian subsisten, dan merupakan kegiatan agribisnis paling primitif. Pemanfaatan sendiri dapat berarti juga menjual atau menukar untuk memenuhi keperluan sehari-hari.

Dalam arti luas agribisnis tidak hanya mencakup kepada industri makanan saja. Seiring perkembangan teknologi, pemanfaatan produk pertanian berkaitan erat dengan farmasi, teknologi bahan, dan penyediaan energi.

4.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

1. Peningkatan Ekonomi Daerah dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat;
2. Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dan Utilitas;
3. Mewujudkan Tatakelola dan Aparatur Pemerintah yang Baik, Bersih, Prima dan Berwawasan Kewirausahaan;
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
5. Membina Masyarakat Religius, Berbudaya dan Taat Hukum;

6. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Teknologi Informasi Komunikasi;
7. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Mineral Secara Berkelanjutan.

BAB 5

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

5.1. SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1.1. SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN MISI 1:

Peningkatan Ekonomi Daerah dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

Sasaran Pokok dari Misi Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat adalah:

1. Meningkatkan Perekonomian Daerah;

Pencapaian sasaran pokok dengan indikasi sebagai berikut:

- a). Struktur perekonomian Kabupaten Mesuji kokoh dan tangguh, mula-mula berbasis pertanian dalam arti luas, termasuk agro industri, kemudian ditransformasikan ke basis industri (pengolahan dan manufaktur), perdagangan, dan jasa yang diindikasikan dengan nilai *Location Quotient* (LQ) untuk masing-masing sektor lebih dari 1.
- b). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mesuji tinggi secara berkelanjutan, rata-rata mencapai 7,5 % pertahun sampai dengan tahun 2025;
- c). Iklim investasi semakin baik ditandai dengan *Incremental Capital to Output Ratio* (ICOR) berkisar antara 3-4.
- d). Sistem industrial berdaya saing tinggi, komoditas atau produk unggulan Mesuji kompetitif, baik di pasar domestik maupun global ditandai dengan nilai Shift-share yang positif.
- e). Bertambahnya jumlah tujuan wisata dan bertambahnya wisatawan yang datang.
- f). Tumbuhnya lembaga keuangan bank dan non bank, peningkatan kontribusi sektor keuangan dalam pembentukan PDRB Mesuji dan peningkatan kontribusi sektor keuangan Mesuji pada PDRB sektor keuangan Provinsi Lampung.
- g). Tumbuhnya pusat perdagangan di kabupaten dan kecamatan, Peningkatan kontribusi sektor perdagangan dalam pembentukan PDRB Mesuji dan peningkatan kontribusi sektor perdagangan Mesuji pada PDRB sektor perdagangan Provinsi Lampung.
- h). Tumbuhnya pusat bisnis jasa di Kabupaten dan kecamatan, peningkatan kontribusi sektor jasa dalam pembentukan PDRB

Mesuji dan peningkatan kontribusi sektor jasa Kabupaten Mesuji pada PDRB sektor Jasa Provinsi Lampung.

Untuk mencapai sasaran pokok Meningkatnya Perekonomian Daerah maka pembangunan diarahkan pada:

- a). Struktur perekonomian Mesuji berbasis pada sektor pertanian dan dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang memperhatikan kepentingan nasional sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Pengelolaan kebijakan ekonomi Mesuji memperhatikan secara cermat dinamika globalisasi, komitmen nasional di berbagai forum perjanjian ekonomi internasional, dan kepentingan nasional dengan mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah, menjaga kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa.
- b). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mesuji diarahkan pada pengembangan agribisnis dengan berorientasi pada pertumbuhan nilai tambah sektor pertanian yang didukung oleh pertumbuhan sektor Industri (pengolahan dan manufaktur), Perdagangan dan Jasa. Sehingga terjadi keterkaitan antar sektor. Penguatan keterkaitan atau sinergisme, kerjasama, dan koordinasi antar sub sistem agribisnis untuk lebih meningkatkan kinerja sistem.
- c). Penyerapan investasi dari dalam maupun luar negeri dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan ekonomi dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Mesuji. Investasi di Mesuji diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan menciptakan iklim investasi yang menarik dan melakukan promosi-promosi investasi (PMA dan PMDN).
- d). Pembangunan Industri yang berdaya saing dibangun dengan basis keunggulan daerah dengan fokus pengembangan industri yang mengolah SDA (industri primer) agar bernilai tambah tinggi dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan daya dukung sumber daya alam. Industri diarahkan untuk mampu merespon dinamika pasar dalam negeri maupun pasar global melalui pengembangan promosi investasi maupun produksi agar mampu memperkuat integrasi ekonomi nasional, kemandirian bangsa, dan keterkaitan antar industri.
- e). Pembangunan pariwisata diarahkan pada pengembangan agrowisata, wisata budaya dan wisata bahari yang didukung

dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan infrastruktur yang memadai.

- f). Pembangunan dibidang keuangan diarahkan pada peningkatan jumlah penyedia jasa layanan keuangan dan fungsi intermediasi lembaga keuangan yang handal.
- g). Pembangunan sektor perdagangan melalui pengembangan sarana dan prasarana perdagangan dan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.
- h). Pembangunan industri jasa ditekankan untuk mendukung pembangunan sektor primer, perdagangan dan pariwisata.

2. Meningkatnya dan Makin Meratanya Kesejahteraan Masyarakat.

Pencapaian sasaran pokok dengan indikasi sebagai berikut:

Nilai Tukar Petani Mesuji diatas Rata-rata Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung.

- a). Ketahanan pangan daerah Mesuji kuat dan mantap ditandainya dengan terpenuhinya rasio kecukupan pangan.
- b). Indeks Gini Rasio dibawah 0,3
- c). Presentase aset tanah produktif yang dikelola masyarakat Mesuji meningkat.
- d). Koperasi dan UKM tumbuh dan berkembang dengan produktifitas tinggi dan jaringan pemasaran yang kuat sehingga menjadi pilar utama kelembagaan ekonomi
- e). Terjaminnya kesinambungan usaha dan keharmonisan antara stakeholder, dunia industri dan lingkungan.
- f). Jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 %
- g). Tingkat pengangguran terbuka tidak lebih dari 5% dan kesempatan kerja meningkat, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Arah kebijakan untuk pencapaian sasaran pokok ini adalah sebagai berikut:

- a). Peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani melalui pengembangan usaha pertanian berwawasan agribisnis yang lebih terarah pada peranan usaha agroindustri. Peningkatan produktivitas sektor pertanian dengan melakukan revitalisasi pembangunan pertanian melalui: usaha-usaha diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi terhadap lahan yang tersedia secara terpadu, serasi dan merata sesuai dengan kondisi tanah, air dan iklim dengan tetap memelihara

kelestarian dan kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

- b). Untuk subsektor perikanan, dikembangkan minapolitan baik tangkap maupun budidaya. Minapolitan menjadi keniscayaan mengingat potensi Mesuji dengan keberadaan sungai Mesujinya. Kawasan Sungai Mesuji dan sekitarnya, dapat dikembangkan menjadi penghasil perikanan yang unggul di Provinsi Lampung. Keunggulan tersebut, didapat dari kekhasan komoditasnya.
- c). Meningkatkan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam wilayah Mesuji dan daerah lain yang defisit pangan dalam rangka menunjang tujuan pencapaian kebutuhan pangan nasional.
- d). Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan agribisnis, khususnya agroindustri yang dapat memajukan perekonomian di pedesaan.
- e). Pemerataan pembangunan ekonomi di Kabupaten Mesuji diarahkan pada peningkatan kapasitas pasar di tiap-tiap kecamatan menjadi pusat perdagangan dan jasa (business district) dalam suatu sistem wilayah perencanaan yang sinergis dengan menekankan keterkaitan kegiatan ekonomi dalam bentuk mata rantai proses industri dan distribusi untuk mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi.
- f). Pengelolaan aset produktif tanah oleh masyarakat Mesuji dengan orientasi pemanfaatan yang tinggi.
- g). Mengembangkan dan meningkatkan keberdayaan KUMKM sebagai pilar perekonomian rakyat. Pengembangan KUMKM diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi kerakyatan yang berbasis iptek dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu menembus pasar yang kompetitif. Dilakukan melalui peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan, akses permodalan dan peningkatan produktivitas serta menjalin penguatan hubungan/ kemitraan bersama koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan besar.
- h). Penerapan konsep *Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) sebagai bagian dari hubungan kemitraan antara perusahaan besar dengan KUMKM serta peningkatan bina lingkungan.

- i). Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap kesempatan kerja dan mengembangkan usaha serta mengembangkan kelembagaan masyarakat miskin untuk meningkatkan akses terhadap kesempatan dan perlindungan kerja.
- j). Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang dilakukan melalui peningkatan pelayanan pendidikan/pelatihan kerja berbasis kompetensi dan profesionalisme.
- k). Pemerintah berperan aktif untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan di masyarakat dalam rangka menumbuhkan lapangan kerja baru. Selain itu diperlukan upaya-upaya menumbuhkembangkan usaha masyarakat yang sudah ada agar dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak melalui pembinaan manajemen dan perkuatan permodalan.

5.1.2.SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN MISI:

Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dan Utilitas

Sasaran Pokok dari Misi ini adalah Meningkatnya Daya Dukung Infrastruktur dan Utilitas. Sasaran pokok tersebut diindikasikan oleh:

- a). Peningkatan panjang jalan kabupaten untuk Jalan Produksi dan Jalan Usaha Tani.
- b). Jaringan infrastruktur transportasi (darat, udara, air dan sungai) yang handal, dan terintegrasi dalam sistem jaringan inter dan antar-moda.
- c). Pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan (rumah tangga, pemerintahan, fasilitas umum, fasilitas sosial dan industri). Elektrifikasi perkampungan di seluruh Kabupaten Mesuji stabil dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara baik dan berkelanjutan.
- d). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah yang komprehensif tersusun dengan baik dan dipatuhi secara konsekuen.
- e). Terbangunnya instalasi air bersih untuk memenuhi berbagai keperluan konsumsi air.
- f). Meningkatnya kualitas permukiman dan perumahan
- g). Pengelolaan sampah dilakukan secara profesional dan berkelanjutan
- h). Meningkatnya daya dukung irigasi.

- i). Terbangunnya prasarana kolam untuk pemberdayaan rumah tangga perikanan budidaya.
- j). Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah daerah.
- k). Meningkatnya daya dukung infrastruktur Teknologi Informasi
- l). Kejelasan perbatasan kabupaten, kecamatan dan kampung.

Pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran diarahkan pada:

- a). Pengembangan jaringan infrastruktur yang diprioritaskan pada infrastruktur transportasi, yaitu pembangunan Jalan Produksi dan Jalan Usaha Tani. Jalan Produksi dimaksudkan untuk mempermudah akses kekawasan perkebunan. Sedangkan Jalan Usaha Tani dimaksudkan untuk mempermudah akses kekawasan pertanian. Pembangunan jaringan infrastruktur diarahkan melibatkan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kelompok masyarakat.
- b). Pembangunan simpul jaringan transportasi antar moda (terminal, bandara dan pelabuhan) yang terintegrasi dengan baik.
- c). Pengembangan jaringan infrastruktur transportasi untuk wilayah timur Mesuji yang akan menghubungkannya dengan kawasan di pantai timur Sumatera.
- d). Pengembangan jaringan listrik yang menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Mesuji. Pemerintah harus secepatnya melakukan dorongan kepada PLN untuk mengembangkan jaringan infrastruktur listrik. Jaringan listrik yang memadai akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan akan menumbuhkan usaha-usaha kreatif masyarakat. Untuk pemenuhan pasokan listrik, pemerintah akan mengembangkan pembangkit listrik independen.
- e). Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara komprehensif dan seimbang, antara lain: Peningkatan sistim pusat-pusat permukiman; Pengembangan pusat pertumbuhan; Pengembangan pusat-pusat kegiatan wilayah (PKW) dan pusat kegiatan lokal (PKL); Pengembangan kawasan-kawasan produktif; Pemantapan kawasan konservasi dan; meningkatkan keterkaitan wilayah di Kabupaten Mesuji dengan kabupaten/provinsi lain.
- f). Pembangunan instalasi air bersih diarahkan untuk menjaga ketersediaan sumberdaya air yang berkelanjutan bagi berbagai keperluan konsumsi air dengan mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui

- peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan konsumsi air serta peningkatan kapasitas dan keandalan pasokan air.
- g). Pembangunan permukiman dan perumahan sehat melalui pengembangan perumahan sehat beserta sarana air bersih, air limbah dan drainase yang memenuhi standar.
 - h). Sistem pengelolaan sampah yang tidak terputus mulai dari penghasil sampah, pemilahan sampah organik dan an-organik, pengumpul, pengangkutan, pembuangan akhir TPA dan pengolahan sampah.
 - i). Pembangunan irigasi untuk mendukung peningkatan produksi pertanian. Khusus padi rawa, perlu dikembangkan irigasi rawa untuk meningkatkan frekuensi panen dan produktivitas per hektar.
 - j). Pembangunan prasarana kolam ikan pada kampung-kampung yang secara tradisional sumber penghasilannya dari ikan air tawar dan payau (sungai dan rawa).
 - k). Pembangunan prasarana (bangunan) perkantoran pemerintah daerah secara strategis, efektif dan efisien dengan memperhatikan ketersediaan lahan dan anggaran serta pemanfaatan.
 - l). Pembangunan jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu yang diinisiasi oleh pemerintah daerah.
 - m). Penegasan perbatasan kabupaten, antar kecamatan dan antar kampung.

5.1.3.SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN MISI:

Mewujudkan Tatakelola dan Aparatur Pemerintah yang Baik, Bersih, Prima dan Berwawasan Kewirausahaan

Sasaran Pokok dari pelaksanaan misi ini adalah:

1. Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Daerah.

Sasaran meningkatnya kapasitas daerah ditunjukkan dengan indikator sebagai berikut:

- a). Meningkatnya kapasitas individu aparatur pemerintah.
- b). Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.
- c). Meningkatnya kapasitas sistem pemerintah daerah..

Pembangunan pencapaian sasaran meningkatnya kapasitas pemerintah daerah diarahkan pada:

- a). Peningkatan kapasitas individu aparatur pemerintah daerah memungkinkan individu birokrat sebagai pembelajar aktif dalam bidang tugas yang sesuai dengan jenjang eselon, fungsi dan sektor yang ditanganinya. Kapasitas yang diperlukan

- mencakup aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, kompetensi dan etika aparaturn pemerintah daerah.
- b). Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah untuk membangun mekanisme kelembagaan, sumberdaya, struktur organisasi dan sistem pengambilan keputusan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja lembaga. Kapasitas yang diperlukan mencakup keseluruhan semua mata-rantai pembuatan kebijakan publik mulai dari tahapan agenda perencanaan dan perumusan kebijakan hingga pada implementasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan.
 - c). Peningkatan kapasitas sistem pemerintah daerah untuk membangun mekanisme kelembagaan dan aturan main yang memungkinkan terjadinya sinergi peran individu dan lembaga untuk secara kolektif mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Kapasitas yang diperlukan menyangkut kemampuan untuk melembagakan keseluruhan kapasitas individu dan organisasional sebagai sebuah produk-produk peraturan perundangan dan kebijakan, misalnya peraturan daerah, peraturan bupati dan lain-lain.

2. Meningkatnya kualitas manajemen keuangan daerah

Indikator dari sasaran pokok tersebut adalah:

- a). Keuangan daerah terjaga dan terkelola dengan baik, transparan, akuntabel, dan efektif yang didukung oleh sistem informasi manajemen keuangan daerah berbasis Teknologi Informasi.
- b). Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat secara signifikan dan berkontribusi penting dalam keuangan daerah.

Kebijakan pembangunan diarahkan pada:

- a). Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat berbasis teknologi informasi.
- b). Optimalisasi pendapatan daerah Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi pelayanan terhadap masyarakat dan efisiensi pemungutan PAD.

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum

Meningkatnya kualitas pelayanan umum ditandai dengan:

Tersusunnya Standar Pelayanan Minimum terkait semua urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah dan konsistensi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimum.

Kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran ini diarahkan pada:

Peningkatan fungsi dan peran pemerintah agar mampu memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dengan penerapan dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) disesuaikan dengan ISO, serta semakin mendekatkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

4. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan ditandai dengan:

Meningkatnya peran masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan karenanya, kebijakan pembangunan diarahkan pada: Peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

5. Keterbukaan Informasi dan Komunikasi

Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi dalam pembangunan ditandai dengan: Terjaminnya transparansi dan keterbukaan informasi dan adanya kebebasan media yang bertanggung jawab.

Kebijakan pembangunan diarahkan pada: Pembangunan bidang komunikasi dan informasi untuk mendukung penyelenggaraan demokratisasi yang harmonis, sehingga diperlukan peran aktif pers dan media informasi dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah. Hal ini dimungkinkan untuk terjadinya komunikasi timbal balik antara masyarakat dan pemerintah sehingga dapat menumbuhkan motivasi pembangunan secara kebersamaan.

6. Pembangunan Politik Lokal

Meningkatnya Pembangunan Politik Lokal dalam pembangunan ditandai dengan:

- a). Pendidikan politik masyarakat dan etika politik lokal berjalan baik.
- b). Kapasitas Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan partai politik semakin baik

Kebijakan pembangunan diarahkan pada:

- a). Mengembangkan budaya politik yang santun dalam kerangka menjaga momentum demokratisasi, pengembangan wawasan

kebangsaan, penguatan peran dan fungsi infrastruktur maupun suprastruktur politik, penguatan pola seleksi dan pergantian kepemimpinan politik lokal secara regulatif, serta peningkatan keserasian hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah dalam bingkai sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b). Memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, melaksanakan reformasi struktur politik dan nilai-nilai persamaan, anti kekerasan dan nilai-nilai toleransi.

7. Penegakan Hukum dan Tata Peraturan Daerah

Meningkatnya Penegakan Hukum dan Tata Peraturan Daerah dalam pembangunan ditandai dengan: Pendayagunaan dan Tata Peraturan Daerah lebih optimal dan efektif.

Kebijakan pembangunan diarahkan pada: Pembangunan penegakan supremasi hukum dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan

8. Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana

Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana dalam pembangunan ditandai dengan: Kelembagaan perlindungan masyarakat, penanganan kerawanan sosial dan penanggulangan bencana semakin kuat dan berfungsi.

Kebijakan pembangunan diarahkan pada: Pembangunan fungsi kelembagaan lokal dalam bidang perlindungan masyarakat, penanganan kerawanan sosial dan penanggulangan bencana serta mengupayakan keswadayaan masyarakat.

5.1.4.SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN MISI:

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

Sasaran Pokok yang akan dicapai adalah Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia. Pencapaiannya ditandai oleh:

- a). Kualitas pendidikan SDM Kabupaten Mesuji meningkat, ditandai oleh Indeks Pengetahuan diatas rata-rata provinsi.
- b). Kualitas tenaga kerja kompetitif dalam persaingan nasional dan global.
- c). Penguasaan dan penciptaan IPTEK semakin tinggi untuk kesejahteraan masyarakat.
- d). Kualitas pelayanan kesejahteraan sosial meningkat.
- e). Derajat kesehatan masyarakat rata-rata tinggi, ditandai oleh angka harapan hidup yang tinggi.
- f). Instrumen jaminan kesehatan untuk ibu, anak, manusia lanjut dan keluarga miskin tersedia memadai.

- g). Instrumen jaminan pangan untuk tiap rumah tangga yang aman dan kualitas gizi yang memadai.
- h). Laju pertumbuhan penduduk menurun menuju keseimbangan.
- i). Peningkatan Indeks Pembangunan Gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, penurunan tindak kekerasan eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
- j). Kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang (ekonomi, sosial, politik, budaya) semakin tinggi.
- k). Budaya dan prestasi olahraga masyarakat Kabupaten Mesuji meningkat.

Kebijakan pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada:

- a). Pembangunan pendidikan diarahkan pada pemantapan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas manusia sehingga mampu bersaing dalam era global. Pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis dan jenjang perlu disediakan secara bermutu dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. Penyediaan pelayanan pendidikan disemua lapisan usia sesuai perkembangan iptek perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat Mesuji termasuk untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan. Selain itu, pemerataan sekolah dan tenaga pengajar sangat penting untuk dilakukan.
- b). Keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu dan teknologi yang berdaya saing tinggi, menciptakan keseimbangan antara kecerdasan inteligensi, emosional, dan spiritual, sehingga perlu dikembangkan dengan dukungan sistem kebijakan pendidikan yang unggul. Serta didukung pula oleh penelitian dan penyebarluasan serta penerapan hasil penelitian kepada masyarakat.
- c). Pembangunan pendidikan diselenggarakan dengan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan serta pelatihan yang mampu merespon globalisasi terhadap kebutuhan pembangunan nasional melalui pengembangan kurikulum pendidikan dan jalur pendidikan dengan memperhatikan kearifan budaya lokal dan potensi Mesuji.
- d). Peningkatan kualitas, kapasitas dan kapabilitas lembaga pendidikan kearah skala regional dan nasional sesuai dengan perkembangan global. Penempatan lokasi yang paling memungkinkan adalah di Simpang Pematang dengan

mengkonversi sebagian kecil (500-1000 Ha) wilayah Hutan Tanaman Industri.

- e). Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan, dan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat, manajemen kesehatan serta pemerataan sarana dan SDM kesehatan.
- f). Pembangunan kesehatan dititik beratkan pada pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut dan masyarakat miskin.
- g). Pembangunan kesehatan juga dilaksanakan dengan usaha sanitasi, peningkatan kualitas gizi masyarakat dan pengendalian penyakit menular, serta pengembangan peran institusi kesehatan masyarakat sebagai pusat pemberdayaan untuk membentuk lingkungan dan perilaku sehat serta peningkatan peran dan fungsi kaum perempuan sebagai penggerak pembangunan di seluruh tingkat dan lapisan masyarakat.
- h). Upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang didukung dengan pengembangan dan penataan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil secara terpadu.
- i). Peningkatan pembangunan keluarga berencana yang ditopang oleh kemajuan pendidikan, peningkatan mobilitas penduduk, bertambahnya wanita dalam angkatan kerja, dan lain-lain. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan mewujudkan keluarga sejahtera melalui penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi, kesehatan reproduksi remaja, penanggulangan narkoba, PMS serta pengembangan peran serta masyarakat guna mewujudkan KB mandiri.
- j). Pembangunan kelembagaan Pengarusutamaan Gender, perlindungan anak dan pembangunan perempuan.
- k). Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik.
- l). Pembangunan Olahraga diarahkan pada peningkatan budaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga dikalangan masyarakat.

5.1.5.SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN MISI:

Membina Masyarakat Religius, Berbudaya dan Taat Hukum

Sasaran Pokok dari pelaksanaan misi ini adalah:

1. Terwujudnya Masyarakat yang Religius

Terwujudnya Masyarakat yang Religius dengan indikator: Masyarakat bermoral tinggi, yang dicirikan oleh watak dan perilaku masyarakat yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dan dinamis.

Untuk mencapai sasaran pokok yang ditetapkan, maka kebijakan pembangunan diarahkan pada: pembangunan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan Mesuji, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Disamping itu, pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat kota yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.

2. Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya

Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya, dengan indikator: budaya daerah yang mantap, tercermin dari meningkatnya harkat dan martabat, peradaban, dan jati diri, serta kepribadian masyarakat.

Untuk mencapai sasaran pokok yang ditetapkan, maka kebijakan pembangunan diarahkan pada: Kesadaran akan budaya luhur yang dimiliki Mesuji memberikan arah bagi perwujudan identitas yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya lokal dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kehidupan.

3. Terwujudnya Masyarakat yang Taat Hukum

Terwujudnya Masyarakat yang Taat Hukum, dengan indikator: Peran serta masyarakat dalam mendukung terwujudnya ketentraman dan ketertiban menguat.

Untuk mencapai sasaran pokok yang ditetapkan, maka kebijakan pembangunan diarahkan pada: pembangunan masyarakat yang taat hukum dengan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, peningkatan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat, pembangunan profesionalisme aparat, penegakan supremasi hukum dan penegakan prinsip-prinsip persamaan hukum.

5.1.6.SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN MISI:

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Teknologi Informasi Komunikasi

Sasaran yang ditetapkan untuk misi ini adalah Terwujudnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Teknologi Informasi Komunikasi Secara Maksimal dalam Kehidupan Masyarakat dan Pemerintahan. Adapun indikasi keberhasilannya adalah sebagai berikut:

- a). Berorientasi pada kemajuan IPTEK yang tepat guna dan efisien dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b). Tersedianya dukungan informasi dan komunikasi dalam pelayanan masyarakat serta terwujudnya pengembangan jaringan teknologi dan pengembangan database pemda.
- c). Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Kebijakan pembangunan diarahkan pada:

- a). Teknologi tepat guna dikembangkan dan diterapkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. melalui peningkatan penguasaan dan penerapan secara luas teknologi di dalam sistem produksi, pengembangan lembaga penelitian, penerapan standar mutu mengacu pada sistem pengukuran, standarisasi, pengujian dan mutu, serta peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana teknologi. Berbagai langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan, serta pengembangan kelembagaan untuk keterkaitan fungsional sistem inovasi dalam mendorong pengembangan kegiatan usaha.
- b). Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi bagi pemerintah dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kinerja pelayanan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi bagi masyarakat untuk meningkatkan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi, intervensi harga dan kebijakan perdagangan.

5.1.7.SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN MISI:

Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Mineral Secara Berkelanjutan

Sasaran pokok misi ini adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Mineral Secara Optimal

Sasaran terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan mineral secara optimal diindikasikan oleh: Pengelolaan SDA dan mineral secara efisien diperuntukkan bagi kemajuan dan kemakmuran rakyat Mesuji dan peningkatan kontribusi sektor penggalian dan subsektor kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto.

Kebijakan pembangunan diarahkan pada: pemanfaatan SDA dan mineral dilakukan sebesar-besarnya oleh masyarakat Mesuji untuk kemakmuran daerah dan masyarakat Mesuji melalui: Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemasaran, peningkatan kapasitas dan infrastruktur pengangkutan untuk menaikkan produksi, upaya diversifikasi pada tahapan komersial dan optimalisasi nilai tambah SDA mineral; dan menerapkan teknologi eksplorasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

2. Terwujudnya Pelestarian Alam di Kabupaten Mesuji

Sasaran pokok terwujudnya pelestarian alam di Kabupaten Mesuji diindikasikan oleh:

- a). Konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air berupa sarana dan prasarana pengairan, terutama irigasi terjaga dengan baik sehingga mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
- b). Pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup baik.
- c). Kesadaran sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup tinggi.

Arah kebijakan pembangunan pelestarian alam di Kabupaten Mesuji adalah:

- a). Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik perlu penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
- b). Kebijakan pengelolaan SDA perlu didukung oleh peningkatan kelembagaan pengelola SDA dan lingkungan hidup; penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas;

- pemerintahan yang kredibel dalam mengendalikan konflik; SDM yang berkualitas; perluasan penerapan etika lingkungan; serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap.
- c). Penanaman cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan didorong melalui internalisasi ke dalam kegiatan produksi dan konsumsi, dan menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan.
 - d). Mengembalikan fungsi hutan register 45 menjadi hutan lindung sebagai wilayah konservasi sumber daya alam. Pengembalian fungsi hutan tersebut dilakukan setelah sebagian lahannya yang terletak di sepanjang jalan negara antara Way Serdang dan Simpang Pematang seluas 500 s.d. 1000 Ha dikonversi sebagai wilayah unggulan pendidikan, permukiman sehat, wilayah perdagangan dan jasa. Proses pengembalian fungsi hutan ditargetkan selambat-lambatnya pada akhir tahapan lima tahun pertama RPJPD.

5.2. TAHAPAN DAN PRIORITAS

Substansi visi, misi dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) harus dapat diimplementasikan dalam tahapan-tahapan per lima tahunan (RPJM). Kabupaten Mesuji merupakan daerah otonomi baru. Pembentukannya terjadi di tahun 2008. Oleh karena itu, untuk mencapai akhir periode RPJPD (tahun 2025), Kabupaten Mesuji hanya melewati 3 (tiga) tahapan RPJM.

Tema pembangunan RPJPD selama 3 (tiga) tahapan RPJM yang disesuaikan dengan pencapaian visi Mesuji Tumbuh, Berkembang, Maju dan Berdaya Saing dibagi menjadi: Mesuji Tumbuh dan Berkembang; Mesuji Maju; dan Mesuji Berdaya Saing.

5.2.1.TAHAP LIMA TAHUN KE-1 (2011-2015)

Tahap ini mengambil tema pembangunan Mesuji Tumbuh dan Berkembang. Pada tahap ini dilakukan peletakan dasar kapasitas dan percepatan pembangunan. Sasaran pokok yang akan dicapai dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam tahap lima tahun pertama pembangunan jangka panjang daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Perekonomian Daerah dengan arah kebijakan pembangunan kepada:

- a). Penguatan struktur ekonomi Kabupaten Mesuji yang berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan kehutanan) berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.
- b). Pertumbuhan agribisnis yang didukung oleh pertumbuhan sektor industri, perdagangan dan jasa. Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan jasa terhadap PDRB adalah sebesar: Pertanian 45,54%; Industri Pengolahan 24,20%; Perdagangan 15,12%; dan Jasa 4,88%.
- c). Promosi investasi yang didukung oleh kepastian hukum untuk lahan dan pelayanan perizinan yang berkualitas dan terukur.
- d). Pembangunan agro industri dengan peningkatan produktivitas sektor pertanian disisi hulu. Diindikasikan oleh kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB terus meningkat mencapai 24,20%.
- e). Pembangunan pariwisata berbasis agrowisata, wisata budaya dan wisata bahari.
- f). Fasilitasi tempat usaha untuk kantor/pusat kegiatan bank dan non bank. Kontribusi sektor Keuangan terhadap pembentukan PDRB terus meningkat mencapai 3,14%.
- g). Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan dan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi. Diindikasikan oleh kontribusi sektor Perdagangan terhadap pembentukan PDRB terus meningkat mencapai 15,12%.
- h). Pembangunan industri jasa ditekankan untuk mendukung pembangunan sektor primer, perdagangan dan pariwisata. Diindikasikan oleh kontribusi sektor Jasa terhadap pembentukan PDRB Mesuji terus meningkat mencapai 4,88%.

2. Meningkatnya dan Makin Meratanya Kesejahteraan Masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan kepada:

- a). Peningkatan usaha revitalisasi pembangunan pertanian
- b). Pengembangan minapolitan dengan memanfaatkan DAS yang diorientasikan pada keunggulan khas komoditas.
- c). Meningkatkan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan Mesuji.
- d). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan agribisnis.
- e). Pengembangan fungsi pasar-pasar kecamatan sebagai pusat perdagangan dan jasa dalam bentuk mata rantai produksi dan distribusi.

- f). Peningkatan pengelolaan aset produktif berupa tanah oleh masyarakat Mesuji dengan pemanfaatan yang tinggi.
- g). Peningkatan keberdayaan KUMKM untuk menjadi pelaku ekonomi kerakyatan yang berbasis Iptek dan berdaya saing.
- h). Peningkatan kualitas penerapan Corporate Social Responsibility.
- i). Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap kesempatan kerja dan mengembangkan usaha serta mengembangkan kelembagaan masyarakat miskin untuk meningkatkan akses terhadap kesempatan dan perlindungan kerja.
- j). Peningkatan perluasan kesempatan kerja, kualitas, produktivitas tenaga kerja, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja.
- k). Menumbuhkan semangat kewirausahaan di masyarakat dalam rangka menumbuhkan lapangan kerja baru dan menumbuhkan usaha masyarakat yang sudah ada agar dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak melalui pembinaan manajemen dan perkuatan permodalan.

3. Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dan Utilitas dengan arah kebijakan pembangunan kepada:

- a). Pembangunan Jalan Pertanian dan akses jalan menuju kawasan terisolasi.
- b). Pembangunan terminal diarahkan pada pembangunan terminal tipe C, untuk memperlancar mobilisasi orang dan barang;
- c). Persiapan pengembangan jaringan infrastruktur transportasi untuk wilayah timur Mesuji yang akan menghubungkannya dengan kawasan di pantai timur Sumatera.
- d). Peningkatan luas layanan listrik PLN sehingga menjangkau seluruh wilayah Mesuji.
- e). Peningkatan sistim pusat-pusat permukiman; Pengembangan pusat pertumbuhan; Pengembangan Pusat-pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) dan pusat kegiatan lokal (PKL); Pengembangan kawasan-kawasan produktif; Pemantapan kawasan konservasi; berdasar RTRWP Lampung bahwa sistem perkotaan di Mesuji yaitu PKWp di Mesuji dan PKL di Wiralaga;
- f). Pembangunan instalasi air bersih
- g). Pembangunan permukiman dan perumahan sehat
- h). Pembangunan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
- i). Pembangunan irigasi di lahan rawa/tata air mikro;
- j). Pembangunan prasarana kolam ikan yang didukung dengan sistem pengairan yang handal.

- k). Pembangunan kantor pemerintah daerah.
- l). Peningkatan daya dukung infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- m). Penegasan perbatasan kabupaten, antar kecamatan dan antar kampung.

4. Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Daerah dengan arah kebijakan pembangunan kepada:

- a). Peningkatan kapasitas individu aparatur pemerintahan.
- b). Peningkatan kapasitas lembaga pemerintah daerah.
- c). Peningkatan kapasitas sistem pemerintah daerah yang didukung dengan teknologi informasi yang handal.

5. Meningkatnya Kualitas Manajemen Keuangan Daerah dengan arah kebijakan pembangunan kepada:

- a). Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan berbasis teknologi informasi.
- b). Peningkatan pengelolaan PAD diarahkan pada intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung dengan ketersediaan database mutakhir serta efisiensi pemungutan PAD.

6. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dengan arah kebijakan pembangunan kepada: Pengembangan dan penerapan SPM yang didukung dengan teknologi informasi.

7. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dengan arah kebijakan pembangunan peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

8. Keterbukaan informasi dan komunikasi dengan arah kebijakan pembangunan peningkatan keterbukaan komunikasi dan informasi

9. Pembangunan Politik Lokal dengan arah kebijakan:

- a). Pembangunan budaya politik yang beretika.
- b). Pembangunan kapasitas kelembagaan demokrasi.

10. Penegakan Hukum dan Tata Peraturan Daerah dengan arah kebijakan pembangunan Peningkatan penegakan supremasi hukum dan peningkatan upaya penataan peraturan perundang-undangan daerah.

11. Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana dengan arah kebijakan pembangunan fungsi kelembagaan lokal dalam bidang perlindungan masyarakat, penanganan kerawanan sosial dan penanggulangan bencana serta mengupayakan keswadayaan masyarakat.

12. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan arah kebijakan pembangunan kepada:

- a). Pemantapan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan; peningkatan pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis dan jenjang; pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar; penyediaan pelayanan pendidikan disemua lapisan usia sesuai perkembangan iptek; pemerataan sekolah dan tenaga pengajar.
- b). Pembangunan sistem pendidikan yang unggul dan peningkatan kualitas penelitian dan penerapannya.
- c). Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan memperhatikan kearifan budaya lokal dan potensi daerah Mesuji.
- d). Peningkatan kualitas, kapasitas dan kapabilitas lembaga pendidikan.
- e). Peningkatan kesadaran, kemauan, kemampuan, dan derajat kesehatan masyarakat.
- f). Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut dan masyarakat miskin.
- g). Peningkatan sanitasi, peningkatan kualitas gizi masyarakat, peningkatan upaya pengendalian penyakit menular dan peningkatan peran institusi kesehatan.
- h). Peningkatan pengendalian laju pertumbuhan penduduk
- i). Peningkatan pembangunan keluarga berencana
- j). Peningkatan pemberdayaan perempuan dan anak.
- k). Peningkatan kualitas pemuda dan partisipasi pemuda dalam pembangunan.
- l). Peningkatan budaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga dikalangan masyarakat.

13. Terwujudnya Masyarakat yang Religius, dengan arah kebijakan pembangunan kepada: peningkatan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan Mesuji dan peningkatan kerukunan beragama.

14. Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya, dengan arah kebijakan pembangunan kepada peningkatan kesadaran budaya luhur Mesuji.

15. Terwujudnya Masyarakat yang Taat Hukum, dengan arah kebijakan pembangunan kepada peningkatan pembangunan masyarakat yang taat hukum.

16. Terwujudnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Teknologi Informasi Komunikasi Secara Maksimal dalam Kehidupan Masyarakat dan Pemerintahan dengan arah kebijakan pembangunan kepada:

- a). Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.
- b). Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi bagi pemerintah dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kinerja pelayanan dengan membangun sistem informasi manajemen daerah yang terpadu.
- c). Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi bagi masyarakat untuk meningkatkan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi, intervensi harga dan kebijakan perdagangan.

17. Terwujudnya Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Mineral Secara Optimal dengan arah kebijakan pembangunan kepada: pengelolaan kehutanan diarahkan pada pendayagunaan potensi sumberdaya alam secara optimal yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan nilai tambah, serta dengan tetap melakukan upaya konservasi.

18. Terwujudnya Pelestarian Alam di Kabupaten Mesuji dengan arah kebijakan pembangunan kepada:

- a). Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang;
- b). Pengembangan kebijakan pengelolaan SDA.
- c). Peningkatan cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan.
- d). Mengembalikan fungsi hutan register 45 menjadi hutan lindung sebagai wilayah konservasi sumber daya alam.

5.2.2. TAHAP LIMA TAHUN KE-2 (2016-2020)

Tema pembangunan pada tahapan pembangunan ini adalah Mesuji Maju. Pembangunan yang dilakukan adalah upaya peningkatan kapasitas dan modernisasi. Sasaran pokok yang akan dicapai dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam tahap lima tahun kedua pembangunan jangka panjang daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Perekonomian Daerah dengan arah kebijakan pembangunan kepada:

- a). Pemantapan struktur ekonomi Kabupaten Mesuji yang berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas dan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.
- b). Pertumbuhan daya saing agribisnis dan keterpaduan antar sektor ekonomi. Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan jasa terhadap PDRB adalah sebesar: Pertanian 41,77%; Industri Pengolahan 24,32%; Perdagangan 16,79%; Jasa 5,59%.

- c). Peningkatan daya serap investasi melalui peningkatan iklim investasi dan promosi investasi.
- d). Peningkatan kualitas industri menuju berdaya saing dengan peningkatan kegiatan pengolahan hasil pertanian untuk menjadi barang jadi atau setengah jadi. Diindikasikan oleh kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB terus meningkat mencapai 24,32%.
- e). Peningkatan pembangunan pariwisata berbasis agrowisata, wisata budaya dan wisata bahari.
- f). Peningkatan jumlah penyedia jasa keuangan dan penguatan fungsi intermediasi lembaga keuangan. Kontribusi sektor Keuangan terhadap pembentukan PDRB terus meningkat mencapai 3,49%
- g). Penguatan sarana dan prasarana perdagangan dan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap pembentukan PDRB terus meningkat mencapai 16,79%.
- h). Pengembangan industri jasa ditekankan untuk mendukung pembangunan sektor primer, perdagangan dan pariwisata. Diindikasikan oleh kontribusi sektor Jasa terhadap pembentukan PDRB Mesuji terus meningkat mencapai 5,59%.

2. Meningkatnya dan Makin Meratanya Kesejahteraan Masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan kepada:

- a). Pemantapan usaha revitalisasi pembangunan pertanian
- b). Peningkatan pembangunan minapolitan
- c). Pemantapan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan Mesuji dan Kabupaten Lain di Provinsi Lampung.
- d). Pemantapan partisipasi masyarakat dalam pengembangan agribisnis
- e). Peningkatan kapasitas pasar di tiap-tiap kecamatan menjadi pusat perdagangan dan jasa (*business district*) dalam suatu sistem wilayah perencanaan yang sinergis.
- f). Pengembangan sistem pengelolaan tanah produktif oleh masyarakat Mesuji secara transparan dan berhasil guna.
- g). Pengembangan KUMKM menjadi pelaku ekonomi berbasis iptek dan berdaya saing tinggi, serta penguatan hubungan kemitraan.
- h). Pemantapan kualitas penerapan *Corporate Social Responsibility*.
- i). Penguatan akses masyarakat miskin terhadap kesempatan kerja dan mengembangkan usaha serta mengembangkan kelembagaan masyarakat miskin untuk meningkatkan akses terhadap kesempatan dan perlindungan kerja.

j). Penguatan perluasan kesempatan kerja, kualitas, produktivitas tenaga kerja, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja.

k). Peningkatan semangat kewirausahaan di masyarakat dan peningkatan kapasitas usaha masyarakat yang sudah ada.

3. Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dan Utilitas dengan arah kebijakan pembangunan kepada:

a). Peningkatan kuantitas dan kualitas Jalan Produksi, Jalan Usaha Tani dan akses jalan menuju kawasan terisolasi.

b). Pemantapan terminal dan pelabuhan sungai;

c). Pengembangan jaringan infrastruktur transportasi di wilayah timur Mesuji dengan status jalan negara yang akan dihubungkan dengan jalur lintas timur Sumatera.

d). Pemantapan luas layanan listrik PLN dan pengembangan pembangkit listrik independen untuk mencukupi kebutuhan listrik di mesuji

e). Pemantapan sistim pusat-pusat permukiman; Pemantapan pusat pertumbuhan; Pemantapan pusat-pusat kegiatan wilayah (PKW) dan pusat kegiatan lokal (PKL); Pemantapan kawasan-kawasan produktif; Pemantapan kawasan konservasi dan; meningkatkan keterkaitan wilayah di Kabupaten Mesuji dengan kabupaten/provinsi lain.

f). Peningkatan layanan penyediaan air bersih.

g). Peningkatan kualitas permukiman dan perumahan.

h). Peningkatan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan upaya daur ulang.

i). Peningkatan luas layanan irigasi dan pengembangan irigasi rawa.

j). Peningkatan prasarana kolam ikan yang didukung dengan sistem pengairan yang handal untuk meningkatkan daya saing komoditas

k). Peningkatan pembangunan kantor pemerintah daerah.

l). Penguatan daya dukung infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

4. Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah dengan arah kebijakan pembangunan kepada:

a). Pemantapan kapasitas individu aparatur pemerintahan.

b). Pemantapan kapasitas lembaga pemerintah daerah.

c). Pemantapan kapasitas sistem pemerintah daerah.

5. Meningkatkan Kualitas Manajemen Keuangan Daerah dengan arah kebijakan pembangunan kepada:

a). Pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah.

b). Pengembangan tatakelola PAD.

- 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum dengan arah kebijakan pembangunan kepada: Peningkatan kualitas dan pencapaian SPM.**
- 7. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dengan arah kebijakan pembangunan kepada Peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.**
- 8. Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi dengan arah kebijakan pembangunan kepada penguatan keterbukaan komunikasi dan informasi**
- 9. Pembangunan Politik Lokal dengan arah kebijakan pembangunan kepada:**
 - a). Peningkatan budaya politik yang beretika.
 - b). Peningkatan kapasitas kelembagaan demokrasi
- 10. Penegakan Hukum dan Tata Peraturan Daerah dengan arah kebijakan pembangunan kepada penguatan supremasi hukum dan penataan peraturan perundang-undangan daerah.**
- 11. Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana dengan arah kebijakan pembangunan kepada peningkatan fungsi kelembagaan lokal dalam bidang perlindungan masyarakat, penanganan kerawanan sosial dan penanggulangan bencana serta mengupayakan keswadayaan masyarakat.**
- 12. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan arah kebijakan pembangunan kepada:**
 - a). Pengembangan pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis dan jenjang; peningkatan penyediaan pelayanan pendidikan disemua lapisan usia sesuai perkembangan iptek; dan peningkatan pemerataan sekolah dan tenaga pengajar.
 - b). Peningkatan kualitas sistem pendidikan dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sumber daya manusia.
 - c). Pemantapan kualitas dan relevansi pendidikan dengan memperhatikan kearifan budaya lokal dan potensi daerah Mesuji.
 - d). Peningkatan kualitas, kapasitas dan kapabilitas lembaga pendidikan kearah skala regional sesuai dengan perkembangan global.
 - e). Penguatan kesadaran, kemauan, kemampuan, dan derajat kesehatan masyarakat.
 - f). Penguatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut dan masyarakat miskin.

- g). Penguatan sanitasi, penguatan kualitas gizi masyarakat, penguatan upaya pengendalian penyakit menular dan penguatan peran institusi kesehatan.
- h). Penguatan pengendalian laju pertumbuhan penduduk
- i). Penguatan pembangunan keluarga berencana
- j). Penguatan pemberdayaan perempuan dan anak.
- k). Penguatan kualitas pemuda dan partisipasi pemuda dalam pembangunan.
- l). Penguatan budaya olahraga dan prestasi olahraga dikalangan masyarakat.

13. Terwujudnya Masyarakat yang Religius, dengan arah kebijakan pembangunan kepada: penguatan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan Mesuji dan penguatan kerukunan beragama.

14. Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya, dengan arah kebijakan pembangunan kepada penguatan kesadaran budaya luhur Mesuji.

15. Terwujudnya Masyarakat yang Taat Hukum, dengan arah kebijakan pembangunan kepada penguatan pembangunan masyarakat yang taat hukum.

16. Terwujudnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Teknologi Informasi Komunikasi Secara Maksimal dalam Kehidupan Masyarakat dan Pemerintahan dengan arah kebijakan pembangunan kepada:

- a). Peningkatan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.
- b). Penguatan sistem informasi manajemen daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- c). Penguatan daya dukung Teknologi Informasi Komunikasi bagi masyarakat.

17. Terwujudnya Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Mineral Secara Optimal dengan arah kebijakan pembangunan kepada: pengelolaan pertambangan dengan mengoptimalkan nilai tambah. Hasil pertambangan Mesuji dipasarkan dalam bentuk lain, misal batubara diolah kemudian dipasarkan dalam bentuk listrik.

18. Terwujudnya Pelestarian Alam di Kabupaten Mesuji dengan arah kebijakan pembangunan kepada:

- a). Pemantapan penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang; dan pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

- b). Penguatan kebijakan pengelolaan SDA dalam kegiatan produksi dan konsumsi.
- c). Penguatan cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan.
- d). Peningkatan fungsi hutan register 45 menjadi hutan lindung sebagai wilayah konservasi sumber daya alam.

5.2.3.TAHAP LIMA TAHUN KE-3 (2021-2025)

Tema pembangunan pada tahapan pembangunan ini adalah Mesuji Berdayasaing. Pembangunan yang dilakukan adalah upaya peningkatan daya saing. Sasaran pokok yang akan dicapai dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam tahap lima tahun ketiga pembangunan jangka panjang daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Perekonomian Daerah dengan arah kebijakan pembangunan kepada:

- a). Penegasan struktur ekonomi Kabupaten Mesuji yang berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas dan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.
- b). Pertumbuhan dan pemantapan dayasaing agribisnis dan keterpaduan antar sektor ekonomi. Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan jasa terhadap PDRB adalah sebesar: Pertanian 38,00%; Industri Pengolahan 24,44%; Perdagangan 18,46%; Jasa 6,29%.
- c). Pemantapan tingkat investasi melalui penguatan iklim investasi dan promosi investasi.
- d). Pemantapan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan. Diindikasikan oleh kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB terus meningkat mencapai 24,44%.
- e). Pemantapan pembangunan pariwisata berbasis agrowisata, wisata budaya dan wisata bahari.
- f). Pemantapan fungsi intermediasi lembaga keuangan. Kontribusi sektor Keuangan terhadap pembentukan PDRB terus meningkat mencapai 3,84%
- g). Pemantapan sarana dan prasarana perdagangan dan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap pembentukan PDRB terus meningkat mencapai 18,46%.
- h). Pemantapan industri jasa ditekankan untuk mendukung pembangunan sektor primer, perdagangan dan pariwisata. Diindikasikan oleh kontribusi sektor Jasa terhadap pembentukan PDRB Mesuji terus meningkat mencapai 6,29%.

2. Meningkatkan dan Makin Meratanya Kesejahteraan Masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan kepada:

- a). Keberlanjutan usaha revitalisasi pembangunan pertanian

- b). Pemantapan kawasan minapolitan yang berdaya saing
- c). Penegasan Mesuji sebagai lumbung pangan regional.
- d). Pemantapan fungsi pasar-pasar kecamatan untuk mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi.
- e). Pemantapan sistem pengelolaan tanah produktif oleh masyarakat Mesuji secara transparan dan berhasil guna.
- f). Pemantapan daya saing KUMKM.
- g). Penegasan fungsi Corporate Social Responsibility dalam kemitraan dan bina lingkungan.
- h). Pemantapan akses masyarakat miskin terhadap kesempatan kerja dan mengembangkan usaha serta mengembangkan kelembagaan masyarakat miskin untuk meningkatkan akses terhadap kesempatan dan perlindungan kerja.
- i). Pemantapan perluasan kesempatan kerja, kualitas, produktivitas tenaga kerja, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja.
- j). Penguatan semangat kewirausahaan di masyarakat dan penguatan kapasitas usaha masyarakat yang sudah ada.

3. Meningkatnya Daya Dukung Infrastruktur dan Utilitas dengan arah kebijakan pembangunan kepada:

- a). Pemantapan Jalan Produksi, Jalan Usaha Tani dan akses jalan menuju kawasan terisolasi.
- b). Pemantapan pembangunan bandara.
- c). Pemantapan jaringan infrastruktur transportasi di wilayah timur Mesuji dengan status jalan negara yang akan dihubungkan dengan jalur lintas timur Sumatera.
- d). Pemantapan pembangkit listrik independen.
- e). Stabilisasi pelaksanaan Tata ruang yang komprehensif dan berkelanjutan.
- f). Pemantapan layanan penyediaan air bersih
- g). Pemantapan kualitas permukiman dan perumahan.
- h). Pemantapan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan daur ulang.
- i). Pemantapan luas cakupan layanan irigasi.
- j). Pemantapan prasarana kolam ikan yang didukung dengan sistem pengairan yang handal.
- k). Pemantapan pembangunan kantor pemerintah daerah.
- l). Pemantapan daya dukung infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

4. Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Daerah dengan arah kebijakan pembangunan kepada:

- a). Kesiambungan pemantapan kapasitas individu aparaturn pemerintahan.
- b). Kesiambungan pemantapan kapasitas lembaga pemerintah daerah.
- c). Kesiambungan pemantapan kapasitas sistem pemerintah daerah.
- 5. Meningkatkan Kualitas Manajemen Keuangan Daerah dengan arah kebijakan pembangunan kepada:**
 - a). Pemantapan pengelolaan keuangan daerah.
 - b). Pemantapan tatakelola PAD.
- 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum dengan arah kebijakan pembangunan kepada: pemantapan kualitas dan pencapaian SPM.**
- 7. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dengan arah kebijakan pemantapan peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.**
- 8. Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi dengan arah kebijakan pemantapan keterbukaan komunikasi dan informasi.**
- 9. Pembangunan Politik Lokal dengan arah kebijakan pembangunan kepada:**
 - a). Pemantapan budaya politik yang beretika.
 - b). Pemantapan kapasitas kelembagaan demokrasi.
- 10. Penegakan Hukum dan Tata Peraturan Daerah dengan arah kebijakan pembangunan pemantapan supremasi hukum dan penataan peraturan perundang-undangan daerah..**
- 11. Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana dengan arah kebijakan pembangunan kepada pemantapan fungsi kelembagaan lokal dalam bidang perlindungan masyarakat, penanganan kerawanan sosial dan penanggulangan bencana serta mengupayakan keswadayaan masyarakat.**
- 12. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan arah kebijakan pembangunan kepada:**
 - a). Pemantapan pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis dan jenjang; Pemantapan penyediaan pelayanan pendidikan disemua lapisan usia sesuai perkembangan iptek; Pemantapan pemerataan sekolah dan tenaga pengajar.
 - b). Pemantapan sistem pendidikan yang berdaya saing.
 - c). Kesiambungan dan penguatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan memperhatikan kearifan budaya lokal dan potensi daerah Mesuji.

- d). Peningkatan kualitas, kapasitas dan kapabilitas lembaga pendidikan kearah skala nasional sesuai dengan perkembangan global.
- e). Pemantapan kesadaran, kemauan, kemampuan, dan derajat kesehatan masyarakat.
- f). Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut dan masyarakat miskin.
- g). Pemantapan sanitasi, pemantapan kualitas gizi masyarakat, pemantapan upaya pengendalian penyakit menular dan pemantapan peran institusi kesehatan.
- h). Pemantapan pengendalian laju pertumbuhan penduduk
- i). Pemantapan pembangunan keluarga berencana
- j). Pemantapan pemberdayaan perempuan dan anak.
- k). Penguatan kualitas pemuda dan partisipasi pemuda dalam pembangunan.
- l). Pemantapan budaya olahraga dan prestasi olahraga dikalangan masyarakat.

13. Terwujudnya Masyarakat yang Religius, dengan arah kebijakan pembangunan kepada pemantapan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan Mesuji dan pemantapan kerukunan beragama.

14. Terwujudnya Masyarakat yang berbudaya, dengan arah kebijakan pembangunan kepada pemantapan kesadaran budaya luhur Mesuji.

15. Terwujudnya Masyarakat yang taat hukum, dengan arah kebijakan pembangunan kepada pemantapan pembangunan masyarakat yang taat hukum.

16. Terwujudnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Teknologi Informasi Komunikasi Secara Maksimal dalam Kehidupan Masyarakat dan Pemerintahan dengan arah kebijakan pembangunan kepada:

- a). Pemantapan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.
- b). Pemantapan sistem informasi manajemen daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- c). Pemantapan daya dukung Teknologi Informasi Komunikasi bagi masyarakat.

17. Terwujudnya Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Mineral Secara Optimal dengan arah kebijakan pembangunan kepada: pemantapan pengelolaan SDA dan mineral.

18. Terwujudnya Pelestarian Alam di Kabupaten Mesuji dengan arah kebijakan pembangunan kepada:

- a). Pemantapan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
- b). Pemantapan kebijakan pengelolaan SDA.
- c). Pemantapan cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan.
- d). Pemantapan fungsi hutan register 45 menjadi hutan lindung sebagai wilayah konservasi sumber daya alam.

BAB 6

KAIDAH PELAKSANAAN

6.1. UMUM

Kaidah pelaksanaan RPJPD Kabupaten Mesuji 2005-2025 adalah pedoman umum yang akan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam mengimplementasi kan semua rencana yang terurai dalam naskah RPJPD. Pedoman umum ini adalah prinsip-prinsip dasar yang akan diuraikan lebih rinci dalam berbagai peraturan Bupati, sesuai dengan periode pentahapan pembangunan Kabupaten Mesuji.

6.2. MEKANISME PELAKSANAAN RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2005-2025 memiliki kesempatan implementasi untuk periode 2011-2025, dengan demikian akan dilaksanakan dalam tiga periode tahapan RPJMD, yakni Tahap 1. RPJMD 2012-2017, Tahap 2. RPJMD 2017-2022, dan Tahap 3. RPJMD 2022-2025.

Dengan mempertimbangkan periode pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Mesuji hanya dalam tiga kurun RPJPM maka perlu dilakukan penekanan pada prinsip produktivitas, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan. Untuk mendukung implementasi RPJP Daerah Kabupaten Mesuji, kaidah pelaksanaan akan menggunakan prinsip sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
2. Pelaksanaan prinsip kepemimpinan strategik yang visioner dan transformatif
3. *Shared Values* dalam bentuk budaya kerja yang menekankan pada keterbukaan diri untuk mempelajari ilmu pengetahuan baru, kerjasama dalam tim dan antar kelompok masyarakat, saling menghargai, ikhlas, dan jujur.
4. Penerapan sistem teknologi informasi sebagai sistem pendukung dalam berbagai bentuk kegiatan pemerintahan.
5. Manajemen keuangan berbasis kinerja dan inovatif
6. Sistem keorganisasian yang dikembangkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Mesuji 2025.

7. Pembangunan berbagai *standar operating prosedur* atau prosedur tetap dengan menjelaskan standar pelayanan minimal (SPM) untuk memberikan kepastian pelayanan publik
8. Sistem kepegawaian menekankan pada profesionalisme yang didukung oleh kapabilitas individual sesuai dengan kebutuhan daerah
9. Pengembangan kompetensi aparatur yang disesuaikan dengan kebutuhan percepatan pembangunan Kabupaten Mesuji

6.3. IMPLEMENTASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Sesuai dengan Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, azas pemerintahan yang baik meliputi: (1). Azas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara; (2) Azas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara; (3) Azas Kepentingan Umum adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif; (4) Azas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara; (5) Azas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara; (6) Azas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (7) Azas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dalam pendapat lain diungkap oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengajukan prinsip-prinsip *good governance* sebagai berikut:

1. *Participation*; setiap warga negara memiliki suara dalam pembuatan keputusan, secara langsung maupun melalui

mediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berkelompok dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. *Rule of Law*; aturan hukum, keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi, badan usaha yang menyangkut masyarakat dilakukan berdasarkan hukum,
3. *Transparency*; transparansi yaitu kebebasan arus informasi; dapat diketahui, dimonitor oleh banyak pihak mengenai kebijakan, proses-proses lembaga organisasi pemerintah,
4. *Responsiveness*; lembaga-lembaga pemerintah harus tanggap, responsif terhadap kepentingan *stakeholder*-nya,
5. *Consensus orientation*; berorientasi pada kesepakatan yakni bisa menjadi perantara bagi kepentingan yang berbeda sebagai cara mencari alternatif terbaik dan membela kepentingan yang lebih luas,
6. *Equity*; kesetaraan, semua warga negara laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang status miskin-kaya, memiliki peluang yang sama dalam mendapatkan kesejahteraan,
7. *Effectiveness and efficiency*; setiap proses kegiatan, aktifitas lembaga pemerintah dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan garis yang ditetapkan,
8. *Accountability*; para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab pada publik dan lembaga *stakeholders*-nya,
9. *Strategic vision*; visi strategis, para pemimpin dan publik harus memiliki perspektif *good governance* dan pengembangan SDM yang luas dan jauh ke depan sesuai keperluan pembangunan.

Kemudian agar menjamin terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik dari segi akuntabilitas maka perlu implementasi manajemen kinerja sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Berjalannya SAKIP diawali oleh penetapan kinerja atau *performance agreement*, dari Bupati Kepada Presiden RI melalui Gubernur, dan dari Kepala SKPD kepada Bupati. Kemudian dilanjutkan oleh pengukuran kinerja utama dan kegiatan, dan hasil pengukuran dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) setiap tahunnya.

6.4. IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN STRATEGIK

Kepemimpinan strategik (*strategic leadership*) yang visioner dan transformatif merupakan syarat dari keberhasilan implementasi RPJP Daerah Kabupaten Mesuji 2005-2025. Dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi Kabupaten perlu pengawalan yang ketat dan seksama dari para pemimpin strategik, karena pada dasarnya pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Mesuji adalah praktek manajemen perubahan yang diperlukan untuk menggerakkan seluruh komponen organisasi pemerintahan, elemen masyarakat, untuk mencapai target pada setiap tahapan pembangunan.

Pemimpin strategik di Kabupaten Mesuji tidak hanya Bupati Kepala Daerah dan Ketua DPRD Kabupaten Mesuji, namun semua jajaran satu level dibawahnya para Wakil Ketua DPRD, Ketua Fraksi dan Komisi serta semua Pejabat Eselon 2 termasuk dalam kategori pemimpin strategik. Kesamaan visi dan misi yang telah dirumuskan dalam RPJPD Kabupaten Mesuji 2005-2025, menjadi syarat dasar untuk menjaga keterpaduan atau sinergisitas, sinkronitas, dan konsistensi pembangunan di Kabupaten Mesuji.

6.5. IMPLEMENTASI BUDAYA KERJA

Budaya Kerja adalah falsafah yang didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan kekuatan pendorong, membudaya dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi, kemudian tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat, dan tindakan. Warna Budaya kerja berupa produktivitas, yang tercermin dalam perilaku kerja (kerja keras, ulet, disiplin, dan tanggung jawab). Budaya berfungsi sebagai (1) pembeda organisasi satu dengan organisasi lainnya, (2) identitas bagi anggota organisasi untuk menumbuhkan komitmen luas bagi kepentingan organisasi, (3) pemantap sistem kerja dan sistem sosial dalam organisasi, (4) mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap dan perilaku aparatur. Dengan pengembangan budaya kerja, ditujukan untuk terbangunnya SDM penyedia layanan publik seutuhnya dengan didukung sikap kerja positif dan memiliki kompetensi memadai serta dapat berkomunikasi secara efektif dan efisien sehingga mendorong produktivitas organisasi pemerintahan.

Budaya kerja untuk mendukung produktivitas kerja di Kabupaten Mesuji yang akan diimplementasikan dalam rangka mendukung pelaksanaan RPJPD Kabupaten Mesuji 2005-2025 adalah:

1. Etos, semangat atau antusiasme kerja, dan inisiatif tinggi
2. Kepercayaan diri
3. Kemampuan Individualitas dan kerjasama tim yang solid
4. Kesetaraan dialog antar kolega kerja
5. Hubungan kerja harmonis
6. Dedikasi dan loyalitas
7. Disiplin, jujur dan beretika
8. Berkomitmen terhadap kualitas dan perbaikan kualitas kerja dan pelayanan publik secara kontinyu
9. Kebersihan pribadi secara jasmaniah dan rohaniiah (mental dan spirituil).
10. Hormati dan taati semua peraturan dan prosedur kerja.
11. Inovasi manajemen pemerintahan dalam koridor peraturan yang berlaku (pengembangan organisasi pembelajar atau *learning organization*).

6.6. IMPLEMENTASI SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan syarat dasar lainnya untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Mesuji 2005-2025. Pengembangan infrastruktur TIK merupakan prioritas pembangunan yang mendesak seiring dengan infrastruktur dan sarana fisik. Pengembangan infrastruktur TIK bukan hanya akan mendukung kelancara pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, namun juga akan mendukung kegiatan ekonomi, sosial, politik dan budaya daerah.

Berbagai sistem informasi perlu dikembangkan dan harus didukung oleh kehandalan peralatan (*hardware*), kapabilitas SDM (*humanware*), keorganisasian (*orgaware*), dan pendanaan yang kuat. Sistem informasi tersebut antara lain: Sistem Informasi Geografis Mesuji, Sistem informasi Keuangan, Sistem Informasi Kepegawaian, Sistem Informasi Kependudukan, Sistem Informasi Pendapatan Daerah, Sistem Informasi Kearsipan, Sistem Informasi Perencanaan dan Monitoring Pembangunan, Sistem Informasi Investasi Daerah, dll.

Untuk menjamin keterpaduan pengembangan sistem informasi manajemen di Kabupaten Mesuji perlu diformulasikan Master Plan Sistem Informasi Manajemen yang menjadi acuan bagi

semua pembangunan sistem informasi di Kabupaten Mesuji sampai dengan 2025.

6.7. IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEUANGAN BERBASIS KINERJA

Dalam upaya mewujudkan Visi, menjalankan Misi, serta melaksanakan Arah Pembangunan, Pemerintah Kabupaten Mesuji akan memanfaatkan semua sumber pendanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dari sisi sumber dana pembangunan akan menghimpun dana dari Sumber Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Tugas Pembantuan), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sumbangan Pihak Ketiga Daerah (SP3D), dan sumber lainnya yang sah, seperti Pinjaman Daerah (*municipal bond atau loan*).

Manajemen keuangan pemerintah daerah akan dikelola berdasarkan prinsip yang ada pada Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan. Laporan keuangan dengan opini WTP akan menjadi target pencapaian sejak tahapan pembangunan.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jika pemerintah Mesuji belum dapat mengupayakan sumber pendanaan dari pemerintah pusat maka langkah penerbitan surat pinjaman akan dilakukan.

6.8. IMPLEMENTASI MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR

Seiring dengan tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Mesuji dalam pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Mesuji 2005-2025, maka sumber daya aparatur akan menjadi kunci sukses keberhasilan pelaksanaan berbagai strategi pembangunan. Sesuai dengan prinsip manajemen sumber daya manusia, aparat pemerintahan merupakan modal insani (*human capital*) yang harus dikelola talentanya. Pengembangan sumber daya aparatur akan dimulai dengan *job design*, *human resource need assesment*, *recruitment*, *selection*, dan *education dan training*.

Pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Mesuji akan efektif jika didukung oleh aparatur yang handal, bermotivasi, dan kompetensi tinggi. Untuk mendukung berjalannya sistem manajemen sumber daya aparatur maka perlu diimplementasikan

sistem remunerasi dengan sistem *reward* dan *punishment* yang terukur.

6.9. IMPLEMENTASI STRUKTUR ORGANISASI PENDUKUNG STRATEGI

Pemerintah Kabupaten Mesuji diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan atas prinsip *good governance*, otonomi daerah dan desentralisasi. Sesuai asas *money follows function*, *function follows structure*, *structure follows strategy*, dan *strategy follows vision*.

Asas *money follows function* memiliki pengertian penyerahan kewenangan daerah juga dibarengi dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan harus sesuai dengan tugas dan fungsi yang di emban oleh masing-masing SKPD.

Asas *function follows structure* memiliki pengertian bahwa tugas pokok dan fungsi organisasi pemerintahan daerah harus sinkron dengan organisasi dan tata kerja yang ada. Pada umumnya level deskripsi tugas dan fungsi ini sudah tidak ada masalah, hanya pemahaman atau persepsi dari tugas pejabat eselon.

Asas *structure follows strategy* memiliki pengertian bahwa stuktur organisasi pemerintah daerah dibuat dalam rangka mendukung pelaksanaan strategi yang ada pada RPJP Daerah, RPJM Daerah dan Renstra masing-masing SKPD.

Asas *strategy follows vision* memiliki pengertian bahwa segala kebutuhan *stakeholders*-lah (bukan keinginan dari birokrasi) yang harus dijawab oleh pemerintah daerah. Kebutuhan dinilai dengan mempertimbangkan masalah serta tantangan/ancaman serta peluang. Pemenuhan kebutuhan harus berbasis pada apa kekuatan dan kelemahan pemerintah daerah. Jawaban kebutuhan ini disebut dengan strategi. Strategi sendiri harus dipastikan dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka memenuhi aspirasi masa depan yang terkandung dalam visi Kabupaten Mesuji.

6.10. PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

Salah satu upaya mewujudkan prinsip atau azas kepastian hukum adalah dengan melakukan standarisasi pelayanan publik. Sistem pelayanan publik yang handal adalah pelayanan yang terprediksi dari segi waktu dan outputnya. Agar kualitas

pelayanan sesuai dengan keinginan para pemangku kepentingan maka perlu didefinisikan secara rinci semua prosedur pelayanan dalam bentuk prosedur tetap atau prosedur operasional standar yang didalamnya sudah termasuk standar pelayanan minimal.